



**WALIKOTA YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 558/KEP/2007**

**TENTANG**

**RENCANA AKSI DAERAH  
MEWUJUDKAN PENDIDIKAN BERKUALITAS  
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007-2011**



## WALIKOTA YOGYAKARTA

---

### KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 558 / KEP / 2007

### T E N T A N G

### RENCANA AKSI DAERAH MEWUJUDKAN PENDIDIKAN BERKUALITAS KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007 – 2011

### WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2011, serta untuk menjamin keberhasilan program-program pembangunan yang disusun dalam RPJMD tersebut, maka disusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011;
- b. bahwa Kota Yogyakarta dikenal dengan predikat sebagai Kota Pendidikan yang berkualitas dan terkemuka di Indonesia, sehingga menjadi tujuan bagi para pelajar dan mahasiswa untuk menuntut ilmu di Kota Yogyakarta;
- c. bahwa untuk mempertahankan predikat tersebut maka diperlukan lingkungan yang mendukung proses belajar antara lain melalui pendirian dan pengembangan pusat kegiatan belajar masyarakat dan pendidikan non formal, sehingga pendidikan di Kota Yogyakarta mampu bersaing di tingkat Nasional dan Internasional, khususnya di Asia Tenggara;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a,b dan c diatas, maka perlu adanya Rencana Aksi Daerah Mewujudkan Pendidikan Berkualitas di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004 – 2009;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH MEWUJUDKAN PENDIDIKAN BERKUALITAS YOGYAKARTA TAHUN 2007-2011**

**PERTAMA** : Rencana Aksi Daerah (RAD) Mewujudkan Pendidikan Berkualitas Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 adalah Dokumen Perencanaan Program Terpadu yang bersifat Lintas sektor dan lintas wilayah serta meliputi aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : RAD Mewujudkan Pendidikan Berkualitas Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 dimaksudkan sebagai pedoman dan informasi bagi para pemangku kepentingan dalam membuat komitmen pada program prioritas yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah.

**KETIGA** : Penjabaran RAD Mewujudkan Pendidikan Berkualitas Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 akan ditindaklanjuti setiap tahunnya dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja SKPD).

- KEEMPAT : Menunjuk Asisten Administrasi dibantu Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta untuk mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan program dan kegiatan pada Rencana Aksi Daerah ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal**

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

**ttd**

**H. HERRY ZUDIANTO**

Tembusan :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.  
2. Asisten Tata Praja Setda Kota Yogyakarta.  
3. Asisten Pembangunan Setda Kota Yogyakarta  
4. Asisten Administrasi Setda Kota Yogyakarta.  
3. Kepala SKPD se Kota Yogyakarta.

RENCANA AKSI DAERAH  
MEWUJUDKAN PENDIDIKAN BERKUALITAS  
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007-2011

DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Bab I</b>	
<b>Pendahuluan</b> .....	
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud Dan Tujuan .....	3
C. Lingkup .....	3
<b>Bab II</b>	
<b>Kondisi Pendidikan di Kota Yogyakarta</b> .....	5
A. Pendidikan Anak Usia Dini .....	5
B. Pendidikan Dasar .....	6
C. Pendidikan Menengah .....	10
D. Pendidikan Masyarakat .....	18
E. Pendidikan Sekolah Rumah .....	21
F. Perpustakaan Daerah .....	22
G. Sanggar Kegiatan Belajar .....	22
H. UPT Taman Pintar .....	23
I. Wisata Pendidikan dan Taman Hiburan .....	26
<b>Bab III</b>	
<b>Landasan Pelaksanaan</b> .....	27
A. Landasan Nasional .....	27
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005- 2025 .....	27
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004- 2009 .....	28
B. Landasan Daerah.....	34
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 - 2025 .....	34
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2007- 2011 .....	37
<b>Bab IV</b>	
<b>Rencana Aksi Mewujudkan Pendidikan Berkualitas</b> .....	40
A. Prioritas .....	40
B. Upaya Dan Rencana Aksi .....	41
C. Matrik Rencana Aksi Daerah Mewujudkan Pendidikan Berkua- litas .....	61
<b>Bab V</b>	
<b>Pelaksanaan</b> .....	73
A. Mekanisme .....	73
B. Kelembagaan .....	75
C. Pendanaan .....	75
D. Indikator .....	76
<b>Bab VI</b>	
<b>Penutup</b> .....	78

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Bertolak dari kondisi nyata perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS), pengaruhnya terhadap masyarakat Indonesia khususnya Yogyakarta, perlu mendapatkan perhatian yang serius. Perkembangan tersebut telah masuk ke dalam ranah penyiapan sumber daya pembangunan yang mampu berkompetisi dalam pasar bebas; oleh karenanya dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan bertanggungjawab. Salah satu pilar yang dapat diandalkan untuk mendeteksi gejala perubahan tersebut dan sekaligus memberikan jalan keluar adalah **pendidikan**. Pendidikan hendaknya dirancang secara prediktif dan didukung oleh sektor formal maupun informal sehingga terjadi kinerja yang simbiotis mutualistik.

Usaha Pemerintah membangun pendidikan telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dengan menetapkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang tersebut diharapkan mampu memberi kerangka pendidikan secara utuh terhadap pembangunan sumber daya manusia. Sebagai konsekuensi logis, diselenggarakan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Yogyakarta mempunyai kewajiban melaksanakan amanah masyarakat dalam usaha ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya. Selanjutnya, hal tersebut dituangkan menjadi rencana pengembangan pendidikan yang berkualitas berlandaskan pada 3 (tiga) dasar pembangunan pendidikan: (a) perluasan akses dengan meningkatkan sarana, fasilitas, serta sistem berdasarkan standar baku pendidikan. (b) peningkatan kualitas sesuai dengan situasi nyata perkembangan dunia kerja, dan dunia usaha dengan senantiasa menyesuaikan perkembangan IPTEKS maupun sistem perpolitikan di Indonesia dan Dunia. Direncanakan peningkatan kualitas

yang akuntabel sehingga tetap mampu memberi penguatan ikon Kota Pendidikan yang berkualitas (c) peningkatan SDM Pendidikan baik dari segi kuantitas maupun kualitas dengan mewujudkan profesionalitas dan loyalitas kerja berdasar prinsip *good governance*.

Prestasi capaian hasil pendidikan tersebut tercermin dalam aspek: lulusan, proses, manajemen, dan lingkungan sekolah. Untuk mencapai prestasi capaian hasil pendidikan didukung sarana dan prasarana yang memadai. Perihal program akses pembelajaran, Kota Yogyakarta telah mampu mencapai prestasi tinggi dengan memperoleh penghargaan Tuntas Wajib Belajar 9 Tahun **Widya Krama** dari Departemen Pendidikan Nasional. Sebagai tindak lanjut prestasi tersebut adalah meningkatkan menjadi program Wajib Belajar 12 tahun agar memacu terwujudnya pendidikan yang berkualitas. Sebagai konsekuensinya, dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing dalam era globalisasi, penduduk Kota Yogyakarta harus mendapatkan layanan pendidikan formal sampai dengan tingkat menengah. Asumsi programik kebijakan dituangkan dalam semboyan: **tidak ada penduduk usia sekolah di Kota Yogyakarta yang tidak bersekolah karena alasan biaya**.

Berkaitan dengan program peningkatan kualitas tersebut, secara tidak langsung akan berdampak pada peningkatan perekonomian Kota Yogyakarta. Penyelenggaraan jasa yang mendukung pendidikan merupakan salah satu sektor andalan yang memberikan kontribusi cukup besar bagi PDRB Kota Yogyakarta, dengan demikian predikat Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan yang berkualitas harus terus dipertahankan. Sebagai langkah konkret perlu diciptakan program terpadu dengan mengakumulasi masyarakat terdidik dan kehidupan yang akademis. Untuk membangun masyarakat terdidik diharapkan pendidikan formal maupun nonformal mendasarkan pengembangan IQ, EQ dan SQ melalui pendidikan dan latihan yang terencana serta membangun iklim akademis (*academic atmosphere*). Dalam membangun iklim akademik, ditempuh melalui jalur pendidikan formal, budaya buku dan komunitas baca. Seperti diketahui dengan membaca diharapkan terwujud masyarakat kritis dan mampu menerima

informasi secara jelas. Di samping itu melalui budaya buku, akan meningkatkan capaian kompetensi belajar.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Mewujudkan Pendidikan Berkualitas mengandung maksud sebagai pedoman dan informasi bagi para pemangku kepentingan dalam membuat komitmen di bidang pendidikan pada program/kegiatan prioritas yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah.

Tujuan disusunnya Rencana Aksi Daerah Mewujudkan Pendidikan Berkualitas adalah :

1. meningkatkan akses dan menuntaskan wajib belajar 12 tahun yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau;
2. meningkatkan kuantitas dan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mulai dari keluarga, tingkat Rukun Warga (RW) pendidikan formal Taman Kanak-kanak agar di masa yang akan datang diperoleh input sumber daya manusia yang berkualitas.
3. meningkatkan kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;
4. mengembangkan sistem penyelenggaraan pendidikan yang bermutu melalui *approach, method and technique* / pendekatan, metode, dan teknik (AMT/PMT) untuk mewujudkan keseimbangan kecerdasan intelegensia (*IQ*), emosional (*EQ*), dan spiritual (*SQ*);
5. memperluas jangkauan dan memperdalam materi pendidikan dalam kurikulum pembelajaran formal maupun nonformal.

## **C. LINGKUP**

Berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011, lingkup Rencana Aksi Daerah Mewujudkan Pendidikan Berkualitas adalah mempertahankan predikat Kota



Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tujuan sebagai berikut.

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas dengan biaya yang terjangkau
2. Tuntasnya wajib belajar 12 tahun
3. Meningkatnya kualitas pendidikan sejak usia dini, dasar hingga menengah
4. Meningkatnya kemampuan siswa dari aspek intelegensia, emosional dan spiritual
5. Meratanya kesempatan masyarakat dalam proses pembelajaran
6. Tingginya tingkat kelulusan peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah
7. Menurunnya tingkat buta aksara
8. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan formal dan nonformal.
9. meningkatnya kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan jabatan dan fungsi profesionalitas;

Untuk mencapai berbagai tujuan sebagaimana yang digambarkan di atas, perlu disusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Bidang Pendidikan. Acuan rencana aksi daerah bidang pendidikan tersebut disusun dan dikembangkan dengan mendasarkan pula pada pertimbangan bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Kota Yogyakarta dan masyarakat, sehingga pada kemudiannya Rencana Aksi Daerah bidang pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang partisipatif, berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan suku bangsa.

## **BAB II**

### **KONDISI PENDIDIKAN DI KOTA YOGYAKARTA**

Kota Yogyakarta masih dikenal masyarakat luas sebagai Kota Pendidikan yang terkemuka di Indonesia. Predikat tersebut menarik warga dari daerah lain atau negara lain yang menuntut mengembangkan pendidikan di Kota Yogyakarta. Mereka menuntut ilmu baik pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, maupun pendidikan tinggi.

Di Kota Yogyakarta pendidikan dimulai dari Pendidikan Anak Usia Dini, baik jalur formal maupun jalur pendidikan nonformal. Pendidikan Dasar meliputi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pendidikan Sekolah Menengah meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Berdasarkan hasil rekapitalasi akhir, kondisi sekolah-sekolah di kota Yogyakarta dapat digambarkan sebagai berikut.

#### **A. PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang ada di Kota Yogyakarta dilaksanakan melalui dua jalur, yakni jalur formal dan nonformal. PAUD jalur formal berbentuk Taman Kanak-Kanak dengan menampung peserta didik berusia 4 (empat) tahun ke atas. Sedangkan PAUD non-formal berbentuk kelompok bermain (KB), Tempat Penitipan Anak, Satuan PAUD Sejenis/Pos PAUD yang ada di tingkat wilayah Rukun Warga (RW), dan layanan pendidikan anak yang menyatu dengan program peningkatan pemberdayaan ibu, serta program-program sejenis.

Namun demikian, sampai saat ini kurikulum pendidikan untuk PAUD sampai dengan tahun 2007 belum disusun secara formal. Selama ini pendidikan anak usia dini menggunakan menu *generic* (kompetensi yang bersifat umum sesuai dengan tumbuh kembang anak) yang telah disiapkan oleh Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini. Oleh karenanya, untuk mengatasi kekurangan ini, Dinas Pendidikan Propinsi DIY, PKK Kota Yogyakarta bersama forum PAUD telah menyusun Buku Acuan Panduan Pembelajaran untuk Anak Usia Dini. Dalam pedoman tersebut

dikembangkan pembelajaran alamiah (*naturalistic education*) PAUD. Kepedulian PAUD Di Kota Yogyakarta tinggi, hal ini dibuktikan dengan berdirinya lembaga yang menangani PAUD secara formal maupun informal, seperti: Forum PAUD, Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Yogyakarta, Satuan PAUD Sejenis/Pos PAUD dan Tim PKK Pokja II. Bertolak dari kenyataan ini, Dinas Pendidikan akan menyatukan ide dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis kebutuhan masyarakat agar sesuai dengan filsafat Pendidikan Anak Usia Dini.

Sampai dengan akhir tahun 2007, di Kota Yogyakarta ada 27 unit Kelompok Bermain (KB), 15 Tempat penitipan Anak (TPA), serta 622 Kelompok Satuan PAUD sejenis sesuai dengan jumlah RW yang ada di Kota Yogyakarta.

## **B. PENDIDIKAN DASAR**

Jenjang Pendidikan Dasar meliputi Sekolah dasar (SD) dan yang sederajat dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan yang sederajat. Data yang ada menunjukkan bahwa SD Negeri dan swasta serta SMP Negeri dan swasta banyak berdiri di Kota Yogyakarta, sedangkan kondisi pendidikan dasar di Kota Yogyakarta dapat digambarkan sebagai berikut.

### **1. Sekolah Dasar**

Koordinasi, pembinaan, serta pengawasan Sekolah Dasar (SD) di Kota Yogyakarta dibagi dalam empat wilayah Cabang Dinas Pendidikan, yang meliputi wilayah Yogyakarta Utara, Yogyakarta Timur, Yogyakarta Selatan, dan Yogyakarta Barat. Pada setiap wilayah Cabang Dinas Pendidikan dikoordinasikan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT), sehingga ada UPT Yogyakarta Utara, UPT Yogyakarta Timur, UPT Yogyakarta Selatan, serta UPT Yogyakarta Barat. Dalam RAD ini, strategi pembagian wilayah pembinaan masih tetap dipertahankan agar program dasar pembangunan pendidikan lebih mudah diakses oleh sekolah dan masyarakat secara utuh dan efektif.

Di Kota Yogyakarta terdapat 109 Sekolah Dasar, baik SD negeri maupun SD swasta yang didirikan oleh masyarakat dan tersebar di

empat wilayah koordinasi/pembinaan. Pembinaan pengembangan Sekolah Dasar dilakukan oleh Pengawas Sekolah TK/SD. Para Pengawas Sekolah TK/SD melakukan pembinaan dan supervisi pendidikan terhadap satuan-satuan pendidikan yang menjadi wilayah binaannya dan melaporkan hasil binaannya tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

a. Kurikulum dan Proses Pembelajaran

Sejalan dengan 'ruh' otonomi daerah, kurikulum pendidikan yang dipergunakan sesuai dengan standar baku yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum ini dikembangkan oleh satuan-satuan pendidikan berdasarkan ketentuan yang diberlakukan: Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah, serta minat, kemampuan peserta didik, lingkungan, dan satuan pendidikan.

Pada jenjang Sekolah Dasar, pembelajaran diarahkan kepada pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, menyenangkan, dan aman (PAIKEMA). Sebagai aksi kegiatan, satuan-satuan pendidikan jenjang SD mengarah pada model PAIKEMA tersebut. Pada kesempatan ini, dilaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi Guru-guru SD secara bertahap, agar memiliki kompetensi pedagogis dan mampu melayani pendidikan secara profesional.

b. Ujian Sekolah Daerah Menuju Ujian Nasional Sekolah Dasar

Pada tahapan Ujian akhir di jenjang SD, selama ini Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan Ujian Sekolah Daerah yang dikenal dengan istilah USDA. USDA meliputi 3 mata pelajaran (mapel): Matematika, Bahasa Indonesia, IPA. Nilai USDA dipergunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan kelulusan SD dan pertimbangan untuk memasuki SMP dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pada tahun 2008, USDA SD diganti menjadi Ujian Nasional Sekolah Dasar.

## 2. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Koordinasi, pembinaan, serta pengawasan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Yogyakarta secara langsung ditangani oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Pembinaan pengembangan SMP dilakukan oleh Pengawas Sekolah Mata Pelajaran/Rumpun Mata Pelajaran/Bimbingan Konseling. Pengawas Sekolah melakukan pembinaan dan supervisi pendidikan terhadap satuan-satuan pendidikan sesuai wilayah binaannya dan melaporkan hasil binaannya tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

Saat ini ada 16 SMP Negeri dan 43 SMP swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat.

### a. Kurikulum dan Proses Pembelajaran

Sebagaimana pada jenjang SD, kurikulum SMP yang diberlakukan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum ini dikembangkan oleh satuan-satuan pendidikan dengan mendasarkan pada Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah, serta minat, kemampuan peserta didik, lingkungan, dan satuan pendidikan.

Pembelajaran jenjang SMP diarahkan kepada pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, menyenangkan, dan aman (PAIKEMA) berbasis pendekatan pembelajaran dan pengajaran kontekstual (*Contextual Teaching and Learning*) dan *Informatics and Communication Technology*/Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (ICT/TIK). Melalui dua pendekatan ini, peserta didik dapat mengikuti perkembangan IPTEKS. Sedangkan untuk melayani perkembangan pendidikan, pembelajaran jenjang SMP menggunakan beberapa model dan program layanan, di antaranya program regular, program akselerasi pendidikan, dan program Sekolah Standar Nasional dan Sekolah Berstandar Internasional (SSN dan SBI). Untuk membantu pengembangan tersebut, sekolah diberikan kesempatan menyusun Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) bersama dengan Komite

Sekolah berbasis Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS).

b. Ujian Sekolah dan Ujian Nasional SMP

Pada tahapan Ujian akhir di jenjang SMP, diselenggarakan Ujian Nasional yang meliputi 3 mapel: Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Untuk tahun-tahun berikutnya, Ujian Nasional tidak hanya meliputi tiga mata pelajaran tersebut, tetapi ditambah menjadi beberapa mata pelajaran. Nilai hasil Ujian Nasional dipergunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan kelulusan SMP dan pertimbangan untuk memasuki SMA/SMK dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Pada tahun 2007, capaian hasil Ujian Nasional SMP dapat digambarkan sebagai berikut.

**Tabel 1.a: Persentase Kelulusan Ujian Nasional SMP Tahun 2007**

NO	STATUS	NEGERI	SWASTA	JUMLAH
1	Jumlah Sekolah	16	42	58
2	Jumlah Peserta	3705	3719	7424
3	Lulus	3665 (98,020%)	3261 (87,69%)	6926 (93,292%)
4	Tidak Lulus	40 (1,080%)	458 (12,31%)	498 (6,708%)

Komposisi Nilai Ujian Nasional SMP adalah sebagai berikut.

a. SMP Negeri

**Tabel 1.b: Komposisi Nilai Ujian Nasional SMP Negeri Tahun 2007**

	Bhs. Indonesia	Matematika	Bhs. Inggris	Jumlah Nilai
Klasifikasi	A	A	A	A
Rata-Rata	8,87	7,81	8,41	25,09
Terendah	4,80	3,20	1,67	12,40
Tertinggi	10,00	10,00	10,00	29,80
Standar Deviasi	0,62	1,46	1,63	3,20

b. SMP Swasta

**Tabel 1.c: Komposisi Nilai Ujian Nasional SMP Swasta Tahun 2007**

	Bhs. Indonesia	Matematika	Bhs. Inggris	Jumlah Nilai
Klasifikasi	A	B	B	B
Rata-Rata	8,20	6,51	6,69	21,40
Terendah	2,80	2,00	1,67	5,47
Tertinggi	10,00	10,00	10,00	29,60
Standar Deviasi	1,06	1,77	2,04	4,30

c. SMP Negeri+ Swasta

**Tabel 1.d: Komposisi Nilai Ujian Nasional SMP Negeri dan Swasta Tahun 2007**

	Bhs. Indonesia	Matematika	Bhs. Inggris	Jumlah Nilai
Klasifikasi	A	B	A	A
Rata-Rata	<b>8,54</b>	<b>7,16</b>	<b>7,55</b>	<b>23,25</b>
Terendah	2,80	2,00	1,67	5,47
Tertinggi	10,00	10,00	10,00	29,80
Standar Deviasi	0,93	1,75	2,04	4,22

### C. PENDIDIKAN MENENGAH

#### 1. Sekolah Menengah Atas (SMA)

Pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) ada tiga program akademik, yakni Program Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Program Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), serta program Bahasa. Setiap SMA wajib menyelenggarakan minimal dua program tersebut.

Koordinasi, pembinaan, serta pengawasan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Yogyakarta secara langsung ditangani oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Saat ini ada 11 SMA Negeri dan 37 SMA swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pembinaan pengembangan SMA dilakukan oleh Pengawas Sekolah Mata Pelajaran/Rumpun Mata Pelajaran/Bimbingan Konseling. Para Pengawas Sekolah tersebut melakukan pembinaan dan supervisi pendidikan terhadap satuan-satuan pendidikan yang menjadi wilayah

binaannya dan melaporkan hasil binaannya tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

a. Kurikulum dan Proses Pembelajaran

Kurikulum SMA sederajat yang diberlakukan adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan; kurikulum ini dikembangkan oleh satuan-satuan pendidikan berdasarkan Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah, serta minat, kemampuan peserta didik, lingkungan, dan satuan pendidikan. Pembelajaran diarahkan kepada pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, menyenangkan, dan aman (PAIKEMA) dengan penekanan pada pendekatan kontekstual (*Contextual Teaching and Learning*). Sekolah diberi kesempatan mengembangkan berbagai model pembelajaran konteks kesantunan dan pendidikan budi pekerti. Pendekatan dan model ini pada kemudiannya dipadukan dan dikembangkan dengan pendekatan *Informatics and Computer Technology* (ICT). Melalui pendekatan dan model pembelajaran ini, peserta didik dapat mengembangkan dirinya secara optimal dan dapat mengikuti perkembangan IPTEKS.

Manajemen pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan beberapa program layanan, yakni program regular, program akselerasi pendidikan, Sekolah Kategori Mandiri/Sekolah Standar Nasional (SKM/SSN) dan program Sekolah Berstandar Internasional.

b. Ujian Sekolah dan Ujian Nasional SMA

Pada tahapan Ujian akhir di jenjang SMA, diselenggarakan Ujian Nasional yang meliputi 3 mapel: Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris untuk Program IPA; Ekonomi Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris untuk program IPS dan Bahasa Asing, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris untuk program Bahasa. Untuk tahun-tahun berikutnya, Ujian Nasional tidak hanya meliputi tiga matapelajaran tersebut, tetapi ditambah menjadi beberapa



matapelajaran. Nilai hasil Ujian Nasional dipergunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan kelulusan SMA.

Pada tahun 2007, hasil Ujian Nasional SMA PROGRAM IPA, IPS, dan Bahasa dapat digambarkan sebagai berikut.

## PROGRAM IPA

**Tabel 2.a: Persentase Kelulusan Ujian Nasional SMA Program IPA Tahun 2007**

NO	STATUS	NEGERI	SWASTA	JUMLAH
1	Jumlah Sekolah	11	30	41
2	Jumlah Peserta	1972	1543	3515
3	Lulus	1968 (99,797%)	1429 (92,612%)	3397 (96,643%)
4	Tidak Lulus	4 (0,203%)	114 (7,388%)	118 (3,357%)

### 1. Komposisi Nilai

#### a. SMA Negeri

**Tabel 2.b: Komposisi Nilai Ujian Nasional SMA Negeri Program IPA Tahun 2007**

	Bhs. Indonesia	Matematika	Bhs. Inggris	Jumlah Nilai
Klasifikasi	A	A	A	A
Rata-Rata	8,36	9,07	8,03	25,46
Terendah	6,00	5,40	2,33	17,67
Tertinggi	9,80	10,00	10,00	29,40
Standar Deviasi	0,56	0,63	1,29	1,73

#### b. SMA Swasta

**Tabel 2.c: Komposisi Nilai Ujian Nasional SMA Swasta Program IPA Tahun 2007**

	Bhs. Indonesia	Matematika	Bhs. Inggris	Jumlah Nilai
Klasifikasi	A	A	B	B
Rata-Rata	7,86	7,98	6,62	22,46
Terendah	3,40	2,80	1,33	8,20
Tertinggi	9,60	10,00	10,00	29,00
Standar Deviasi	0,78	1,29	1,77	3,01

c. SMA Negeri+ Swasta

**Tabel 2.d: Komposisi Nilai Ujian Nasional SMA Negeri dan Swasta Program IPA Tahun 2007**

	Bhs. Indonesia	Matematika	Bhs. Inggris	Jumlah Nilai
Klasifikasi	A	A	B	A
Rata-Rata	8,14	8,59	7,41	24,14
Terendah	3,40	2,80	1,33	8,20
Tertinggi	9,80	10,00	10,00	29,40
Standar Deviasi	0,71	1,12	1,67	2,81

**PROGRAM IPS**

**Tabel 2.e: Persentase Kelulusan Ujian Nasional SMA Program IPS Tahun 2007**

NO	STATUS	NEGERI	SWASTA	JUMLAH
1	Jumlah Sekolah	11	36	47
2	Jumlah Peserta	1972	2203	2804
3	Lulus	1968 (99,797%)	2008 (91,148%)	2607 (92,974%)
4	Tidak Lulus	4 ( 0,203%)	195 ( 8,852%)	197 ( 7,026%)

1) Komposisi Nilai

a. SMA Negeri

**Tabel 2.f: Komposisi Nilai Ujian Nasional SMA Negeri Program IPS Tahun 2007**

	Bhs. Indonesia	Bhs. Inggris	Ekonomi	Jumlah Nilai
Klasifikasi	A	A	A	A
Rata-Rata	8,14	7,85	8,82	24,81
Terendah	5,40	4,25	3,40	15,25
Tertinggi	9,60	10,00	10,00	28,55
Standar Deviasi	0,61	1,00	0,82	1,79

b. SMA Swasta

**Tabel 2.g: Komposisi Nilai Ujian Nasional SMA Swasta Program IPS Tahun 2007**

	Bhs. Indonesia	Bhs. Inggris	Ekonomi	Jumlah Nilai
Klasifikasi	B	C	B	B
Rata-Rata	7,38	6,35	7,22	20,95
Terendah	2,80	2,25	1,80	8,40
Tertinggi	9,60	9,75	10,00	28,35
Standar Deviasi	1,01	1,46	1,57	3,27

c. SMA Negeri+ Swasta

**Tabel 2.h: Komposisi Nilai Ujian Nasional SMA Negeri dan Swasta Program IPS Tahun 2007**

	Bhs. Indonesia	Bhs. Inggris	Ekonomi	Jumlah Nilai
Klasifikasi	A	B	A	B
Rata-Rata	7,55	6,68	7,56	21,79
Terendah	2,80	2,25	1,80	8,40
Tertinggi	9,60	10,00	10,00	28,55
Standar Deviasi	0,98	1,51	1,58	3,41

**PROGRAM BAHASA**

**Tabel 2.i: Persentase Kelulusan Ujian Nasional SMA Program Bahasa Tahun 2007**

NO	STATUS	NEGERI	SWASTA	JUMLAH
1	Jumlah Sekolah	-	36	7
2	Jumlah Peserta	-	-	117
3	Lulus	-	2008 (91,148%)	116 (99,145%)
4	Tidak Lulus	-	195 (8,852%)	1 (0,855%)

1. Komposisi Nilai

a. SMA Negeri

**Tabel 2.j: Komposisi Nilai Ujian Nasional SMA Negeri Program Bahasa Tahun 2007**

	Bhs. Indonesia	Bahasa Inggris	Bahasa Asing	Jumlah Nilai
Klasifikasi	-	-	-	-
Rata-Rata	-	-	-	-
Terendah	-	-	-	-
Tertinggi	-	-	-	-
Standar Deviasi	-	-	-	-

b. SMA Swasta

**Tabel 2.k: Komposisi Nilai Ujian Nasional SMA Swasta Program Bahasa Tahun 2007**

	Bhs. Indonesia	Bahasa Inggris	Bahasa Asing	Jumlah Nilai
Klasifikasi	A	A	A	A
Rata-Rata	7,97	7,69	8,09	23,75
Terendah	5,00	4,40	4,00	15,00
Tertinggi	9,40	10,00	10,00	28,80
Standar Deviasi	0,81	1,32	1,55	3,01

c. SMA Negeri+ Swasta

**Tabel 2.1: Komposisi Nilai Ujian Nasional SMA Negeri dan Swasta Program Bahasa Tahun 2007**

	Bhs. Indonesia	Bahasa Inggris	Bahasa Asing	Jumlah Nilai
Klasifikasi	A	A	A	A
Rata-Rata	7,97	7,69	8,09	23,75
Terendah	5,00	4,40	4,00	15,00
Tertinggi	9,40	10,00	10,00	28,80
Standar Deviasi	0,81	1,32	1,55	3,01

2. Sekolah Menengah kejuruan (SMK)

Di Kota Yogyakarta terdapat 7 SMK Negeri dan 26 SMK Swasta dengan berbagai variasi penyelenggaraan program keahlian. Program keahlian yang diselenggarakan di SMK berdasarkan standar kompetensi Dunia Usaha dan Dunia Industri sehingga siap diterjunkan di masyarakat. Program keahlian ini berimplikasi pada akreditasi sekolah.

Prioritas pengembangan pengelolaan kelembagaan SMK, diharapkan pada tahun 2008 adalah pencapaian sesuai dengan ISO 9001-2000. Pada pengembangan berikutnya adalah Sekolah Berstandar Internasional SMK mampu menjalin kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI).

Agar mencapai sekolah berstandar Internasional koordinasi, pembinaan, serta pengawasan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Yogyakarta ditangani secara langsung oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

Pembinaan pengembangan SMK dilakukan oleh Pengawas Sekolah Bidang/Mata Pelajaran/Rumpun Mata Pelajaran/Bimbingan Konseling. Para Pengawas Sekolah tersebut melakukan pembinaan dan supervisi pendidikan terhadap satuan-satuan pendidikan yang menjadi wilayah binaannya dan melaporkan hasil binaannya tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Sampai dengan tahun 2007 terdapat 7 SMK Negeri dan 22 SMK swasta yang dibina oleh Pengawas Mata Pelajaran/ Rumpun Matapelajaran.

a. Kurikulum dan Proses Pembelajaran

Kurikulum pendidikan SMK berbasis pendidikan dan latihan (Diklat) mengikuti Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang dikembangkan berdasarkan bidang keahlian. Pengembangan kurikulum normatif, adaptif serta produktif mendasarkan pada Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, yang telah ditentukan serta Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah, dengan memperhatikan minat, kemampuan peserta didik, lingkungan, dan satuan pendidikan.

Pembelajaran jenjang SMK diarahkan kepada pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, menyenangkan, dan aman (PAIKEMA) berbasis pendekatan pembelajaran dan pengajaran kontekstual (*Contextual Teaching and Learning*) agar dapat mengikuti perkembangan pasar kerja serta DU/DI. Berbagai strategi pembelajaran berorientasi kerja dikembangkan agar memberi kesempatan seluas-luasnya kepada peserta diklat mampu menyesuaikan diri dalam arus pasar Global. Pendekatan dan strategi ini pada kemudiannya dipadukan dan dikembangkan dengan pendekatan *Informatics and Communication Technology* (ICT). Untuk pengembangan diri konteks kesantunan kerja diberikan pendidikan budi pekerti. Melalui multi pendekatan pembelajaran ini, peserta diklat diharapkan dapat mengembangkan diri secara optimal dan dapat mengikuti perkembangan IPTEKS yang berkembang eskalatif.

b. Ujian Sekolah dan Ujian Nasional SMK

Pada tahapan Ujian akhir di jenjang SMK, diselenggarakan Ujian Nasional yang meliputi 3 mapel: Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Untuk tahun-tahun berikutnya, Ujian Nasional tidak hanya meliputi tiga matapelajaran tersebut, tetapi ditambah menjadi beberapa matapelajaran. Nilai hasil Ujian Nasional dipergunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan kelulusan SMK.

Pada tahun 2007, hasil Ujian Nasional SMK dapat digambarkan sebagai berikut.

**Tabel 2.m: Persentase Kelulusan Ujian Nasional SMK Tahun 2007**

NO	STATUS	NEGERI	SWASTA	JUMLAH
1	Jumlah Sekolah	7	22	29
2	Jumlah Peserta	2882	1921	4803
3	Lulus	2658 (92,228%)	1514 (78,813%)	4172 (86,862%)
4	Tidak Lulus	224 (7,772%)	407 (21,187%)	631 (13,138%)

Komposisi Nilai

1) SMK Negeri+Swasta

**Tabel 2.n: Komposisi Nilai Ujian Nasional SMK Negeri dan Swasta Tahun 2007**

	Bhs. Indonesia	Bahasa Inggris	Matematika	Produktif	Jumlah Nilai
Klasifikasi	B	B	C	A	B
Rata-Rata	6,99	6,63	6,30	7,74	27,66
Terendah	2,40	2,60	1,33	1,77	1,17
Tertinggi	9,80	9,80	10,00	9,55	38,17
Standar Deviasi	1,05	1,37	1,90	0,53	3,79

2) SMK Negeri

**Tabel 2.o: Komposisi Nilai Ujian Nasional SMK Negeri Tahun 2007**

	Bhs. Indonesia	Bahasa Inggris	Matematika	Produktif	Jumlah Nilai
Klasifikasi	B	B	C	A	B
Rata-Rata	6,99	6,63	6,30	7,74	27,66
Terendah	2,40	2,60	1,33	1,77	1,17
Tertinggi	9,80	9,80	10,00	9,55	38,17
Standar Deviasi	1,05	1,37	1,90	0,53	3,79

3) SMK Swasta

**Tabel 2.p: Komposisi Nilai Ujian Nasional SMK Swasta Th 2007**

	Bhs. Indonesia	Bahasa Inggris	Matematika	Produktif	Jumlah Nilai
Klasifikasi	B	B	C	A	B
Rata-Rata	6,99	6,63	6,30	7,74	27,66
Terendah	2,40	2,60	1,33	1,77	1,17
Tertinggi	9,80	9,80	10,00	9,55	38,17
Standar Deviasi	1,05	1,37	1,90	0,53	3,79

c. Uji Kompetensi SMK

Di samping wajib mengikuti Ujian Nasional, peserta diklat jenjang SMK wajib mengikuti Uji Kompetensi. Uji kompetensi dimaksudkan agar peserta diklat memiliki kesiapan nyata untuk memasuki Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Dengan demikian, diharapkan tidak terjadi pengangguran pada lulusan SMK.

#### **D. PENDIDIKAN MASYARAKAT**

Sifat pendidikan selalu berkembang mengikuti perkembangan masyarakat pendukungnya. Pada era industri dan komunikasi, informasi berjalan dengan cepat sehingga belum semua ilmu, pengetahuan dan teknologi dapat diajarkan. Sebagai dampaknya, banyak bermunculan pendidikan masyarakat sebagai kepanjangan pendidikan dan latihan yang diberikan sekolah. Pendidikan masyarakat merupakan jalur pendidikan nonformal. Pendidikan ini dilaksanakan dalam bentuk kursus, kelompok belajar masyarakat, dan sejenisnya. Kursus dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, maupun oleh masyarakat.

Sampai saat ini Kota Yogyakarta telah diketahui sebagai kota pusat Pendidikan masyarakat yang mampu memberikan bekal keterampilan yang memadai. Namun demikian belum diketahui secara pasti pola, arah, bentuk dan jenis yang diadakan. Melalui rencana aksi daerah untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, diharapkan adanya penataan ulang kebijakan bidang pendidikan masyarakat serta pengembangannya agar dapat mengikuti perkembangan IPTEKS.

1. Kursus

Banyak kursus yang diselenggarakan oleh masyarakat. Silabus kursus ditetapkan oleh penyelenggara kursus, namun ada beberapa kursus yang silabusnya disediakan oleh Pemerintah Pusat yang merupakan silabus standar. Pada setiap akhir kursus diselenggarakan ujian lokal dan atau nasional. Beberapa jenis kursus dilakukan ujian nasional yang sudah meliputi 26 jenis program pendidikan kursus, seperti ujian Paes

Ageng gaya Yogyakarta, gaya Solo serta pelatihan keterampilan yang lainnya seperti: komputer, bahasa Inggris, otomotif, serta tata kecantikan dll. Untuk meningkatkan mutu pelatihan perlu dilakukan peningkatan kualitas instruktur dan akreditasi lembaga kursus serta pengembangan jaringan kerjasama baik dengan dunia usaha/industri melalui organisasi pengelola kursus dan persatuan instruktur.

## 2. Program Pendidikan Keaksaraan

Pendidikan keaksaraan diarahkan untuk penurunan jumlah penduduk buta aksara dengan prioritas usia 15 sampai dengan 45 tahun ke atas melalui pendekatan pendidikan keaksaraan fungsional. Hal ini dilakukan untuk membekali penduduk yang telah terbebaskan dari kebutaan keaksaraannya untuk memfungsikan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung yang telah dimiliki guna meningkatkan kesejahteraan hidup penduduk secara sosial, ekonomi, dan budaya.

Jumlah penduduk Kota Yogyakarta usia 13 - 44 tahun penyandang buta aksara tahun 2006 sebanyak 622 jiwa dengan rata-rata per-RW sebanyak 1 jiwa.

## 3. Program Pendidikan Kesetaraan

Untuk memberikan layanan kepada masyarakat dalam rangka membantu keaksaraan nasional dan memberantas tiga buta (B3B), diselenggarakan kelompok-kelompok belajar masyarakat. Kelompok belajar masyarakat (Kejar) tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada penyelenggaraan pendidikan jalur formal dan dikelompokkan menjadi Kejar Paket A, Kejar Paket B, Kejar Paket C. Kejar Paket A setara dengan jenjang SD, Kejar Paket B setara dengan Paket B; Kejar paket C setara dengan SMA. Perlunya perluasan model layanan pelajaran Kejar Paket kerjasama dengan Perguruan Tinggi seperti: model Pengabdian Pada Masyarakat, Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kejar Paket atau bentuk lain. Pada setiap tahun diselenggarakan Ujian nasional untuk masing-masing paket.



Program pendidikan kesetaraan bertujuan untuk menurunkan jumlah penduduk usia sekolah yang karena berbagai fakta tidak dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan prioritas untuk menuntaskan wajib belajar 9 atau 12 tahun.

Pendidikan kesetaraan selain untuk menuntaskan wajib belajar (A, B, C) juga diarahkan bagi masyarakat yang ingin mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari yang telah dimilikinya.

#### 4. Pendidikan Kecakapan Hidup

Program pendidikan kecakapan hidup bertujuan untuk membekali masyarakat agar mampu hidup mandiri melalui kecakapan personal, social, akademik, dan vokasional yang diperoleh selama mengikuti program. Pendidikan kecakapan hidup bias dilaksanakan secara terpisah atau terintegrasi dengan berbagai pendidikan nonformal yang ada.

#### 5. Peningkatan Budaya Baca Masyarakat

Program peningkatan budaya baca masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kemampuan keaksaraan masyarakat yang terbebas dari buta aksara. Pemerintah memfasilitasi peningkatan baca in I dengan membentuk Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Perpustakaan RW.

Taman Bacaan Masyarakat dan perpustakaan masyarakat adalah sebuah wadah yang bertujuan untuk memberikan layanan bahan bacaan bagi masyarakat dalam mendorong masyarakat guna membaca dan belajar sepanjang hayat serta untuk memfasilitasi warga belajar pendidikan keaksaraan dalam rangka mendukung pemberantasan buta aksara sehingga para aksarawan baru/melek aksara sehingga tidak kembali menjadi buta aksara.

Fakta yang selama ini terjadi menunjukkan bahwa kuantitas dan kualitas layanan TBM dan Perpustakaan Masyarakat belum maksimal (TBM – Perpustakaan Masyarakat = 110), tersebar di Kota Yogyakarta sehingga pembinaan dan pengembangannya di masa mendatang harus ditingkatkan.

## 6. Pembinaan Kursus dan pelatihan

Program pembinaan kursus dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di berbagai keterampilan. Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi bekerja, usaha mandiri atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Kursus dan pelatihan dapat berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal.

## E. PENDIDIKAN SEKOLAH RUMAH (*HOME SCHOOLING*)

Perlu penataan sistem pendidikan nonformal *Home Schooling* yang akhir akhir ini sedang berkembang di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Penataan sistem Pendidikan nonformal yang dimaksudkan adalah memantau, mengarahkan dan menyinkronkan Pendidikan *Home Schooling* terhadap pendidikan formal sesuai dengan perkembangan masyarakat – ilmu dan teknologi agar dapat dipantau perkembangannya dari segi: mutu dan pemerataan Pendidikan. Perancangan dimulai dari: (a) identifikasi pola penyelenggaraan pembelajaran, (b) sinkronisasi dan ekuivalensi kurikulum berdasarkan Kurikulum Nasional yang berlaku. (c) merancang aturan tentang penghargaan dan sertifikasi *home schooling* agar dapat Mewujudkan Pendidikan Berkualitas di Kota Yogyakarta.

Untuk merealisasikan kebijakan home schooling dijabarkan dalam langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, identifikasi (a) jenis, (b) pola pelaksanaan, (c) kurikulum, (d) model pembelajaran. *Langkah kedua*, (a) sinkronisasi kurikulum, (b) rancangan model sertifikasi dan ujian akhir, (c) ekuivalensi mata pelajaran. *Langkah ketiga*, (a) perancangan aturan, (b) sosialisasi dan masukan, (c) finalisasi, dan (d) model bantuan. Kegiatan ini berbentuk: sarasehan dan diskusi, ceramah, penetapan (termasuk peraturan Walikota serta model bantuan).

## **F. PERPUSTAKAAN DAERAH**

Untuk mempertahankan ikon Kota Pendidikan, perlu dibangun iklim akademik di antaranya melalui pengembangan budaya buku dan komunitas baca. Untuk melayani masyarakat yang menginginkan pengembangan diri melalui pengkajian pustaka agar tercipta budaya buku dan komunitas baca, dikembangkan program perpustakaan. Dalam hal ini Pemerintah Kota Yogyakarta mendirikan Perpustakaan Daerah sebagai bagian yang terpenting dalam konstelasi pembangunan pendidikan yang berkualitas. Untuk mengelola perpustakaan tersebut, dibentuk UPT Perpustakaan Kota Yogyakarta.

UPT Perpustakaan Kota Yogyakarta mendapatkan tugas mengembangkan dan sekaligus membina perpustakaan komunitas yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dan perpustakaan sekolah. Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan perhatian besar terhadap berkembangnya perpustakaan yang dikehendaki masyarakat melalui perpustakaan komunitas melalui sinkronisasi dan pengembangan jaringan kerjasama antar perpustakaan komunitas. Bentuk perhatian tersebut adalah pemberian pembinaan pengelolaan perpustakaan dan pemberian bantuan perpustakaan komunitas. Pembinaan perpustakaan komunitas dilakukan secara koordinatif antara UPT Perpustakaan Kota Yogyakarta dan Lurah serta forum perpustakaan komunitas. Seiring dengan kemajuan komunikasi digital, di masa yang akan datang direncanakan membangun perpustakaan digital (*digital library*) antar – inter perpustakaan di wilayah kota Yogyakarta .

Pada tahun 2007 telah di-lounging berdirinya 126 perpustakaan komunitas yang keberadaannya tersebar di berbagai wilayah RW di Kota Yogyakarta. Perpustakaan-perpustakaan tersebut menjadi binaan perpustakaan daerah Kota Yogyakarta.

## **G. SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)**

Dalam rangka melayani masyarakat belajar yang memerlukan sarana dan fasilitas belajar di luar fasilitasi pendidikan jalur formal, Pemerintah Kota Yogyakarta memfasilitasi kebutuhan masyarakat tersebut melalui

penyediaan Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Yogyakarta. Hal ini juga merupakan usaha mempertahankan dan mengembangkan ikon Kota Pendidikan yang berkualitas melalui pendidikan nonformal.

UPT ini dibentuk dalam rangka mencapai terwujudnya salah satu tujuan Pemerintah Daerah, mencerdaskan segenap warganya karena dengan kecerdasan masyarakat akan dapat mengatasi kemiskinan. Dengan meningkatnya kecerdasan masyarakat, berbagai ketertinggalan negeri ini dari Negara-negara lain tentu akan dapat segera terkejar.

#### **H. UPT TAMAN PINTAR**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu, adalah sesuatu yang seharusnya disyukuri karena menjanjikan kemudahan bagi peningkatan peradaban manusia. Akan tetapi perkembangan ilmu pengetahuan juga menyembunyikan tantangan berupa sikap manusia atas laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Sikap yang tidak tangap atas laju perkembangan ilmu pengetahuan akan mengasingkan manusia dari perkembangan peradaban, sementara itu pada kenyataannya muncul paradok atas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Paradok yang muncul seperti di tengah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ada ketidakmampuan untuk mengakses teknologi yang ada karena kurangnya sarana penyampaian ilmu pengetahuan yang memadai. Realitas perkembangan ilmu pengetahuan yang ada disikapi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan mencanangkan program pembangunan Taman Pintar guna mendekatkan jarak antara perkembangan teknologi dengan penyerapan ilmu pengetahuan oleh masyarakat secara umum. Konsep pembangunan Taman Pintar ditekankan pada ilmu pengetahuan eksakta yang merupakan basis perkembangan teknologi. Kelompok sasaran dari program pembangunan Taman Pintar adalah anak – anak dari usia pra sekolah hingga tingkat sekolah menengah. Rentang usia kelompok sasaran ini dipilih karena dipandang sebagai generasi penerus bangsa yang potensial untuk mengembangkan ilmu

pengetahuan dan teknologi. Program pembangunan Taman Pintar mempunyai arahan yang dirumuskan dalam wujud visi, misi, tujuan dan tema serta motto Taman Pintar. Arahan program pembangunan Taman Pintar sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan fisik pembangunan hingga pengelolaan Taman Pintar.

### **1. Visi**

Wahana ekspresi, apresiasi dan kreasi sains dalam suasana yang menyenangkan

### **2. Misi**

Menumbuhkembangkan minat terhadap sains melalui imajinasi, dugaan dan percobaan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas

### **3. Tujuan**

- a. Memberi kontribusi terhadap penciptaan lingkungan belajar yang kondusif dalam mempelajari sains.
- b. Memotivasi anak dan siswa untuk berkarier di bidang sains
- c. Memberi sarana belajar sains
- d. Membantu guru dalam mengembangkan pengajaran sains
- e. Penciptaan wisata sains
- f. Memperkuat sebutan Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan

### **4. Sasaran**

- a. Menyediakan ruang-ruang pameran (exhibition), kegiatan (event), yang memungkinkan dipromosikannya prinsip-prinsip sains dan teknologi kepada publik, terutama teknologi yang berhubungan dan relevan dengan kehidupan sehari-hari.
- b. Menyediakan laboratorium teknologi dasar bersama (kimia, fisika, biologi, astronomi, matematika, dll)

- c. Mendukung dan melengkapi program pendidikan sains dan teknologi di sekolah, dan tumbuh dan berkembangnya anak-anak dalam suasana pendidikan yang bersahabat.
- d. Memproduksi sumberdaya pendidikan seperti buku, news letter, radio, produk animasi untuk sosialisasi dan memberi pemahaman akan arti pentingnya sains, baik kepada anak-anak, siswa sekolah maupun kepada masyarakat umum.

## **5. Tema**

Merupakan wahana untuk tumbuh kembang anak dalam berapresiasi, berekspresi dan berkreasi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

## **6. Motto**

Motto Taman Pintar adalah: niteni - niroke - nambahi. (*mengidentifikasi – merekayasa – mengembangkan*)

Taman Pintar Yogyakarta didirikan dengan tujuan memberikan ruang publik untuk tempat berekspresi dan apresiasi perkembangan IPTEKS serta memberikan alternatif metode pembelajaran IPTEKS kepada anak-anak dengan bermain dan suasana menyenangkan.

Mereview kembali sebuah gagasan yang sudah lama direalisasikan dalam bentuk rancang bangun walau belum semuanya terwujud, bukan berarti merubah gagasan awal menjadi sebuah gagasan yang baru sama sekali. Tujuan utama mereview rancang bangun ini adalah untuk menyatukan kembali semua ide yang pernah tercecir dan belum terwujud dalam bentuk yang kongkrit dan terarah. Untuk itulah penyajian konsep ini kami sajikan untuk memberikan sebuah alternatif olahan rancang bangun.

Konsep yang ditanamkan oleh Ki Hajar Dewantara (Bapak Pendidikan Indonesia) menjadi pilar utama ide dan pengembangan Taman Pintar. Niteni, Nirokke, Nambahi merupakan konsep pendidikan yang perlu dikembangkan secara luas dalam pendidikan bangsa ini, bukan hanya

dikembangkan melalui jalur pendidikan formal, melainkan melalui berbagai jalur, termasuk dijadikan sebagai konsep pendidikan di Taman Pintar.

## **I. WISATA PENDIDIKAN DAN TAMAN HIBURAN**

Sebagai konsekuensi logis perkembangan pariwisata di Kota Yogyakarta terhadap segala aspek kehidupan masyarakatnya, hadir jenis-jenis industri wisata. Salah satu jenis pariwisata itu adalah wisata pendidikan. Industri pariwisata ini akan memberikan pengaruh terhadap munculnya taman hiburan dan sebagai pendukung industri wisata tersebut. Namun demikian, berkembangnya wisata seperti: wisata pendidikan, wisata kuliner dan bentuk wisata budaya serta taman hiburan yang tidak terpantau secara edukatif akan memberikan dampak berupa ancaman terhadap ikon Kota Pendidikan. Oleh karenanya, pada saat mendatang perlu ditata dan disinkronkan pola, bentuk, jenis serta arah pelaksanaan wisata dan taman hiburan. Pemantauan dan pengarahan Wisata Pendidikan serta Taman Hiburan dapat dilakukan secara terpadu antarinstansi Pemerintah maupun swasta serta, RT, RW, dan Kelurahan maupun perorangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kota Yogyakarta juga dikembangkan sebagai Kota Vokasi. Yang dimaksudkan adalah Kota Yogyakarta, sebagai kota tujuan wisata, memberikan pendidikan dan pelatihan kompetensi vokasional kepada pengunjung/wisatawan. Melalui wisata pendidikan semacam itu, pengunjung akan memperoleh nilai tambah dengan berwisata ke Yogyakarta.

## **BAB III**

### **LANDASAN PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Mewujudkan Pendidikan Berkualitas secara efektif dan efisien memerlukan dukungan dan landasan yang kuat mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang ada di tingkat Nasional, Propinsi maupun Kota.

#### **A. LANDASAN NASIONAL**

##### **1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025**

Visi pembangunan nasional mengarah pada pencapaian tujuan nasional yaitu *Indonesia yang maju, mandiri dan adil*. Maju dalam hal ini mengisyaratkan perlunya berbagai indikator sosial untuk mengukurnya yang pada umumnya berkaitan dengan kualitas sumberdaya manusia (SDM). Kualitas sumberdaya manusia tercermin dari tingkat pendidikan terendah, serta partisipasi pendidikan dan jumlah tenaga ahli serta profesionalisme yang dihasilkan oleh sistem pendidikan. Penyediaan SDM yang berkualitas akan mendorong kemandirian bangsa menuju bangsa yang adil.

Menurut Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, untuk mencapai visi tersebut salah satunya dicapai melalui misi Mewujudkan daya saing bangsa dengan cara memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan masing-masing wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan di dalam negeri; mengedepankan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan iptek; pembangunan infrastruktur yang maju; serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara



Terwujudnya daya saing bangsa untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, ditunjukkan oleh kualitas SDM yang makin meningkat, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas SDM Indonesia ditandai dengan meningkatnya IPM dan IPG, serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang. Dalam mewujudkan visinya maka RPJPNas sangat mengedepankan Pendidikan dalam mencapai sumberdaya manusia yang berkualitas.

## 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009

Mendukung pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun, maka visi pembangunan nasional Tahun 2004-2009 adalah :

- a. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai;
- b. Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia; serta
- c. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Selanjutnya berdasarkan visi pembangunan nasional tersebut ditetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan Nasional Tahun 2004–2009, yaitu:

1. Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai
2. Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis
3. Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera

Pemenuhan hak dasar rakyat sangat ditekankan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan, salah satunya adalah peningkatan akses masyarakat terhadap Pendidikan yang berkualitas. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas merupakan mandat yang harus dilakukan bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam

Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Lebih lanjut dalam Batang Tubuh UUD 1945 diamanatkan pentingnya pendidikan bagi seluruh warga negara seperti yang tertuang dalam Pasal 28B Ayat (1) yaitu bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia, dan Pasal 31 Ayat (1) yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia, bahkan kinerja pendidikan yaitu gabungan angka partisipasi kasar (APK) jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi dan angka melek aksara digunakan sebagai variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bersama-sama dengan variabel kesehatan dan ekonomi. Oleh karena itu pembangunan pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Pembangunan pendidikan nasional yang akan dilakukan dalam kurun waktu 2004 – 2009 telah mempertimbangkan kesepakatan-kesepakatan internasional seperti Pendidikan Untuk Semua (*Education For All*), Konvensi Hak Anak (*Convention on the right of child*) dan *Millenium Development Goals* (MDGs) serta *World Summit on Sustainable Development* yang secara jelas menekankan pentingnya pendidikan sebagai salah satu cara untuk penanggulangan kemiskinan, peningkatan keadilan dan kesetaraan gender, pemahaman nilai-nilai budaya dan multikulturalisme, serta peningkatan keadilan sosial.

Sasaran pembangunan pendidikan sampai dengan tahun 2009 adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan. Adapun Arah kebijakan untuk Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan yang Lebih Berkualitas adalah sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun untuk mewujudkan pemerataan pendidikan dasar yang bermutu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memenuhi hak dasar warga negara. Untuk itu upaya penarikan kembali siswa putus sekolah dan lulusan SD termasuk SDLB, MI dan Paket A yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B serta upaya menurunkan angka putus sekolah harus dioptimalkan;
- 2) Menurunkan secara signifikan jumlah penduduk yang buta aksara melalui peningkatan intensifikasi perluasan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional yang didukung dengan upaya penurunan angka putus sekolah khususnya pada kelas-kelas awal jenjang SD/MI atau yang sederajat serta mengembangkan budaya baca untuk menghindari terjadinya buta aksara kembali (relapse illiteracy), dan menciptakan masyarakat belajar;
- 3) Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan menengah jalur formal dan non formal baik umum maupun kejuruan untuk mengantisipasi meningkatnya lulusan sekolah menengah pertama sebagai dampak keberhasilan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dan penyediaan tenaga kerja lulusan pendidikan menengah yang berkualitas dengan meningkatkan relevansi pendidikan menengah dengan kebutuhan tenaga kerja;
- 4) Meningkatkan perluasan dan mutu pendidikan tinggi termasuk menyeimbangkan dan menyasrakan jumlah dan jenis program studi yang disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan pembangunan dan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi kebutuhan pasar kerja

- serta peningkatan dan pemantapan peran perguruan tinggi sebagai ujung tombak peningkatan daya saing bangsa melalui penciptaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni;
- 5) Meningkatkan perluasan pendidikan anak usia dini dalam rangka membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya;
  - 6) Menyelenggarakan pendidikan non formal yang bermutu untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang tidak mungkin terpenuhi kebutuhan pendidikannya melalui jalur formal terutama bagi masyarakat yang tidak pernah sekolah atau buta aksara, putus sekolah dan warga masyarakat lainnya yang ingin meningkatkan dan atau memperoleh pengetahuan, kecakapan/keterampilan hidup dan kemampuan guna meningkatkan kualitas hidupnya;
  - 7) Menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat dengan memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat terjangkau oleh layanan pendidikan seperti masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di wilayah perdesaan, terpencil dan kepulauan, masyarakat di daerah konflik, serta masyarakat penyandang cacat;
  - 8) Menyelenggarakan pendidikan alternatif di wilayah konflik dan bencana alam yang diikuti dengan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak termasuk penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan, serta penyiapan peserta didik untuk dapat mengikuti proses belajar mengajar;
  - 9) Menyelenggarakan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa;
  - 10) Mengintensifkan pelaksanaan sosialisasi pentingnya pendidikan untuk semua kepada seluruh kelompok masyarakat serta

pelaksanaan advokasi bagi pengambil keputusan untuk memberi perhatian besar pada pembangunan pendidikan;

- 11) Mengembangkan kurikulum baik nasional maupun lokal yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni serta perkembangan global, regional, nasional dan lokal termasuk pengembangan kinestetika dan integrasi pendidikan kecakapan hidup untuk meningkatkan etos kerja dan kemampuan kewirausahaan peserta didik;
- 12) Mengembangkan pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan multikultural guna menumbuhkan wawasan kebangsaan dan menyemaikan nilai-nilai demokrasi dengan cara memantapkan pemahaman nilai-nilai pluralisme, toleransi, dan inklusif dalam rangka meningkatkan daya rekat sosial masyarakat Indonesia yang majemuk, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- 13) Memantapkan pendidikan budi pekerti dalam rangka pembinaan akhlak mulia termasuk etika dan estetika sejak dini di kalangan peserta didik, dan pengembangan wawasan kesenian, kebudayaan, dan lingkungan hidup;
- 14) Menyediakan materi dan peralatan pendidikan (teaching and learning materials) terkini baik yang berupa materi cetak seperti buku pelajaran maupun yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan alam sekitar;
- 15) Meningkatkan jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan lainnya dengan mempertimbangkan peningkatan jumlah peserta didik dan ketepatan lokasi, serta meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi pendidik agar lebih mampu mengembangkan kompetensinya dan meningkatkan komitmen mereka dalam melaksanakan tugas pengajaran;
- 16) Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan sebagai ilmu pengetahuan, alat bantu pembelajaran, fasilitas pendidikan, standar kompetensi, penunjang administrasi

pendidikan, alat bantu manajemen satuan pendidikan, dan infrastruktur pendidikan;

- 17) Mengembangkan sistem evaluasi, akreditasi dan sertifikasi termasuk sistem pengujian dan penilaian pendidikan dalam rangka mengendalikan mutu pendidikan nasional pada satuan pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan, serta evaluasi terhadap penyelenggara pendidikan di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional;
- 18) Menyempurnakan manajemen pendidikan dengan meningkatkan otonomi dan desentralisasi pengelolaan pendidikan kepada satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisien, transparan, bertanggung jawab, akuntabel serta partisipatif yang dilandasi oleh standar pelayanan minimal serta meningkatkan relevansi pembelajaran dengan lingkungan setempat;
- 19) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan termasuk dalam pembiayaan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat serta dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan;
- 20) Menata sistem pembiayaan pendidikan yang berprinsip adil, efisien, efektif, transparan dan akuntabel termasuk penerapan pembiayaan pendidikan berbasis jumlah siswa (student-based financing) dan peningkatan anggaran pendidikan hingga mencapai 20 persen dari APBN dan APBD guna melanjutkan usaha-usaha pemerataan dan penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas;
- 21) Meningkatkan penelitian dan pengembangan pendidikan untuk penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan dan kesetaraan pelayanan, efektivitas dan efisiensi manajemen pelayanan pendidikan termasuk untuk mendukung upaya mensukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang bermutu.

Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut di atas, langkah-langkah yang ditempuh dijabarkan ke dalam program-program pembangunan dan kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut :

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini,
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
3. Program Pendidikan Menengah
4. Program Pendidikan Tinggi
5. Program Pendidikan Non Formal
6. Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
7. Program Pendidikan Kedinasan
8. Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan
9. Program Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan
10. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

## **B. LANDASAN DAERAH**

### 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 -2025

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 Visi Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2005 – 2025 adalah ***Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan.***

Adapun yang dimaksud dengan "**Kota Pendidikan Berkualitas**" adalah :

1. Penyelenggaraan pendidikan di Kota Yogyakarta harus memiliki standar kualitas yang tinggi dan terkemuka di Asia Tenggara;
2. Memiliki keunggulan kompetitif dalam penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu dan teknologi;

3. Mampu menciptakan keseimbangan antara kecerdasan inteligensia (Intelligensia Quotient), emosional (Emotional Quotient) dan spiritual (Spiritual Quotient);
4. Dikembangkan dengan dukungan sistem kebijakan pendidikan yang unggul;
5. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai;
6. Menciptakan atmosfer pendidikan yang kondusif.

Dalam rangka **Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan**, Pembangunan sektor pendidikan 20 tahun ke depan diarahkan sebagai berikut:

- (1) Pembangunan SDM memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan Kota Yogyakarta yang maju dan mandiri sehingga mampu berdaya saing dalam era globalisasi. Dalam kaitan itu, pembangunan SDM diarahkan pada peningkatan kualitas SDM yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).
- (2) Keunggulan kompetitif dalam penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu dan teknologi yang berdaya saing tinggi, menciptakan keseimbangan antara kecerdasan inteligensia, emosional dan spiritual, perlu dikembangkan dengan dukungan sistem kebijakan pendidikan yang unggul serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dengan didukung oleh atmosfer pendidikan yang kondusif.
- (3) Pembangunan pendidikan merupakan investasi dalam meningkatkan kualitas SDM dan penting perannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan harkat, martabat dan kualitas manusia sehingga mampu bersaing dalam era global dengan tetap berlandaskan pada norma kehidupan masyarakat dan tanpa diskriminasi. Pelayanan pendidikan yang



mencakup semua jalur, jenis dan jenjang perlu disediakan secara bermutu dan terjangkau disertai dengan pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar. Penyediaan pelayanan

- (4) pendidikan sepanjang hayat sesuai perkembangan iptek perlu terus didorong untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas penduduk Indonesia termasuk untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan bagi penduduk usia produktif yang jumlahnya semakin besar.
- (5) Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan; penurunan tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; serta penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender ditingkat daerah dan nasional, termasuk ketersediaan data dan statistik gender.
- (6) Pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, iptek dan politik. Di samping itu, pembangunan olahraga diarahkan pada peningkatan budaya olahraga dan prestasi olahraga di kalangan masyarakat.
- (7) Pembangunan iptek diarahkan untuk penciptaan dan penguasaan ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan dasar maupun terapan, serta pengembangan ilmu sosial dan humaniora untuk menghasilkan teknologi dan pemanfaatan teknologi hasil penelitian, pengembangan dan rekayasa bagi kesejahteraan masyarakat, kemandirian dan daya saing melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas iptek yang senantiasa berpedoman pada nilai agama, nilai budaya, nilai etika, kearifan lokal, serta memperhatikan sumber daya dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

## 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2007-2011

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2007–2011, maka visi pembangunan Kota Yogyakarta adalah ***Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang berwawasan Lingkungan.*** Adapun visi tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi pembangunan sebagai berikut.

- a. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan
- b. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan
- c. Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa
- d. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan
- e. Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya
- f. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *clean government* (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum
- g. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai
- h. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas
- i. Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat

Untuk mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan yaitu dengan mengupayakan partisipasi seluruh komponen masyarakat, pemerintah daerah dan swasta agar penyelenggaraan pendidikan di Kota Yogyakarta mempunyai standar kualitas yang tinggi dan terkemuka di Asia Tenggara, mempunyai keunggulan kompetitif yang berdaya saing tinggi, kompetensi tinggi, menekan berbagai pengaruh negatif yang dapat merusak citra pendidikan Kota Yogyakarta; menciptakan sistem dan kebijakan pendidikan yang unggul; membantu penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.

Dengan mengacu pada tahap-tahap yang jelas selama 5 tahun pembangunan kota menuju tercapainya visi antara Kota Yogyakarta 2007- 2011 maka perlu ditetapkan strategi pembangunan daerah dalam bentuk Tematik pembangunan selama 5 tahun periode pembangunan jangka menengah 2007-2011 adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2007 Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana prasarana permukiman, perkotaan, pelayanan publik dan pemulihan kegiatan ekonomi masyarakat.
2. Tahun 2008 Kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata berbasis budaya dengan keragaman atraksi dan daya tarik wisata.
3. Tahun 2009 Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan berkualitas dengan dukungan SDM yang profesional.
4. Tahun 2010 Kota Yogyakarta sebagai kota yang sehat dan nyaman huni dengan pengelolaan fasilitas pelayanan publik yang memadai.
5. Tahun 2011 Kota Yogyakarta sebagai sebagai kota yang tertata rapi dengan tingkat polusi rendah yang didukung dengan pelayanan yang optimal.

Dalam rangka mewujudkan pendidikan berkualitas, pada tahun 2009 tematik pembangunan Kota Yogyakarta adalah "***Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan berkualitas dengan dukungan SDM yang profesional***". Adapun yang dimaksud dengan "Kota Pendidikan Berkualitas" adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kota Yogyakarta harus memiliki standar kualitas yang tinggi, keunggulan kompetitif dalam ilmu dan teknologi yang berdaya saing tinggi, menciptakan keseimbangan antara kecerdasan intelegensia (IQ), emosional (EQ) dan spiritual (SQ), sistem kebijakan pendidikan yang unggul serta penyediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai.

Makna lain dari pendidikan yang berkualitas juga ditunjukkan pada sistem pendidikannya, yaitu sejak input, proses dan output juga memiliki kualitas. Hal ini menyangkut sejak tahapan terendah dalam proses RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011 pendidikan di

sekolah sampai jenjang pendidikan tinggi sistem pendidikan memiliki kualitas yang lebih baik, termasuk tentunya pendidikan yang ada di masyarakat dan keluarga.

Berdasarkan pemahaman tersebut, maka kualitas sumber daya manusia memiliki peran penting. Sedemikian pentingnya peran sumber daya manusia, maka untuk Mewujudkan Pendidikan Berkualitas perlu "didukung SDM yang profesional" baik melalui peningkatan kemampuan guru dalam mengajar maupun peningkatan jenjang pendidikannya.

## **BAB IV**

### **RENCANA AKSI MEWUJUDKAN PENDIDIKAN BERKUALITAS**

#### **A. PRIORITAS**

Pendidikan berkualitas sebagaimana amanah RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 dicapai melalui penyelenggaraan pendidikan yang memiliki standar kualitas yang tinggi, keunggulan kompetitif dalam ilmu dan teknologi yang berdaya saing tinggi, menciptakan keseimbangan antara kecerdasan menciptakan keseimbangan antara kecerdasan intelegensia (IQ), emosional (EQ) dan spiritual (SQ), sistem kebijakan pendidikan yang unggul serta penyediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai.

Tematik Kota Yogyakarta untuk Tahun 2009 lebih menekankan pembangunan di bidang pendidikan yaitu Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan berkualitas dengan dukungan SDM yang profesional. Berdasarkan tematik pembangunan tersebut, dalam rangka mewujudkan pendidikan berkualitas dicapai melalui prioritas kebijakan sebagai berikut.

#### **1. Kebijakan Pokok**

- a. Meningkatkan Akses Pendidikan Dasar Dan Menengah 12 Tahun Yang Berkualitas Dengan Biaya Yang Terjangkau;
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan dari aspek: lulusan, proses, manajemen, sarana prasarana dan lingkungan sekolah;
- c. Mengembangkan sistem pendidikan berkualitas yang dapat mewujudkan keseimbangan antara kecerdasan intelegensia, emosional, dan spiritual;
- d. Memperluas jangkauan dan jenis sistem pembelajaran untuk masyarakat;

#### **2. Kebijakan Penunjang**

- a. Memanfaatkan tehnologi informasi, sumber daya manusia dan organisasi yang meliputi struktur, sistem dan prosedur serta kepastian pelayanan.

- b. Meningkatkan wawasan kebangsaan, keamanan, ketertiban dan peran media komunikasi dengan prinsip demokrasi yang dijiwai oleh semangat persatuan, kerukunan, kedamaian, kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran.
- c. Meningkatkan peran generasi muda dalam mendukung keamanan, ketertiban dan persatuan.
- d. Mengembangkan Lingkungan Usaha dan Iklim Investasi.
- e. meningkatkan manajemen pembangunan.
- f. Memasyarakatkan budaya perilaku hidup sehat (pola hidup dan lingkungan) dan surveillance serta monitoring kesehatan.
- g. Melakukan inovasi dan pengembangan seluruh aspek kepariwisataan yang tetap berlandaskan kepada wisata pendidikan, wisata budaya, wisata bangunan bersejarah, wisata konvesi berbasis industri.
- h. Meningkatkan kesadaran, kedisiplinan dan peran serta masyarakat dalam menjaga dan menciptakan suasana Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai.

## **B. UPAYA DAN RENCANA AKSI**

Untuk menjamin keberhasilan program-program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011, maka disusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Mewujudkan Pendidikan Berkualitas. Rencana Aksi ini merupakan kumpulan program dan kegiatan yang komprehensif dan sinergis dari seluruh pemangku kepentingan. Upaya dan rencana aksi Mewujudkan Pendidikan Berkualitas dikelompokkan melalui prioritas kebijakan sebagai berikut.

### **1. Meningkatkan Akses Pendidikan Dasar Dan Menengah 12 Tahun Yang Berkualitas Dengan Biaya Yang Terjangkau**

Akses pendidikan dasar dan menengah 12 tahun dilaksanakan dengan memperhitungkan kualitas dan keterjangkauan pembiayaan. Sebagai konsekuensinya, Pemerintah Daerah memberikan jaminan pendidikan daerah (JPD) kepada warga Kota Yogyakarta untuk dapat

menikmati pendidikan melalui program wajib belajar 12 tahun. Jaminan pendidikan diberikan melalui beberapa kegiatan, yakni pemberian beasiswa, pemberian bantuan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah, serta fasilitasi pemilihan jenjang pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan.

#### **a. Pengelolaan dan Pemberian Beasiswa**

Pemerintah Kota Yogyakarta menjamin keberlangsungan anak-anak usia sekolah untuk dapat mengikuti pendidikan, dengan mendirikan UPT Jaminan Pendidikan Daerah bagi anak-anak tidak mampu. Pemberian jaminan dilaksanakan melalui fasilitasi anggota masyarakat pemegang KMS. Dasar pembentukan UPT Jaminan Pendidikan Daerah adalah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35/KEP/2007.

Agar regulasi tentang Jaminan Pendidikan Daerah tersebut dapat dipahami masyarakat diselenggarakan sosialisasi. Sosialisasi Jaminan Pendidikan Daerah sudah dilakukan kepada masyarakat, baik melalui jalur kewilayahan (kecamatan/kelurahan) maupun melalui sekolah-sekolah oleh Dinas Kesejahteraan Sosial bersama-sama dengan Dinas Pendidikan. Pada tahap berikutnya dilakukan pendataan warga Kota Yogyakarta yang berhak memperoleh Kartu Menuju Sejahtera (KMS) oleh Dinas Kesejahteraan Sosial dengan melibatkan tokoh masyarakat serta Pengurus RT dan RW. Data yang dihasilkan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial dimanfaatkan oleh Dinas Pendidikan untuk melakukan penyusunan program Jaminan Pendidikan Daerah.

#### **Penjaringan siswa berprestasi berbasis kewilayahan**

Pemerintah Kota Yogyakarta sangat memberikan perhatian kepada pengembangan pendidikan di Kota Yogyakarta mengingat pendidikan merupakan lokomotif utama pembangunan. Kualitas pendidikan menjadi pertimbangan utama dalam pengembangan pendidikan tersebut. Untuk itu, berbagai hal dilakukan untuk

memotivasi pengembangan kualitas pendidikan, baik pengembangan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, kualitas sarana dan prasarana, kualitas layanan, kualitas peserta didik, dan sebagainya.

Upaya peningkatan kualitas peserta didik dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah melalui pemberian beasiswa bagi siswa yang dapat menunjukkan prestasi akademiknya. Untuk itu, Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan beasiswa prestasi bagi siswa yang menunjukkan prestasinya di bidang akademik. Melalui pemberian beasiswa prestasi ini diharapkan ada peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama pada sumber daya siswa di Kota Yogyakarta dan pada kemudiannya diharapkan adanya peningkatan sumber daya manusia Kota Yogyakarta.

**Pemberian beasiswa prestasi ditujukan untuk:**

1. Memotivasi siswa agar menjadi siswa berprestasi, khususnya prestasi akademik;
2. Memberikan penghargaan kepada siswa yang mampu menunjukkan prestasi akademiknya;
3. Mewujudkan bentuk kepedulian dan pembinaan Pemerintah Kota Yogyakarta kepada warganya yang mampu menunjukkan prestasinya di bidang akademik.

**b. Pemberian Bantuan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah**

Untuk meringankan beban orangtua peserta didik dan beban satuan pendidikan dalam menyelenggarakan Ujian Nasional maupun Ujian Sekolah, Pemerintah Daerah memberikan bantuan dana berupa Bantuan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah. Langkah yang dilakukan adalah:

- 1) Pendataan calon peserta Unas/Usek
- 2) Verifikasi calon peserta Unas/Usek
- 3) Penerbitan data nominasi sementara (DNS) peserta
- 4) Validasi peserta sementara



- 5) Penerbitan data nominasi tetap (DNT) peserta Unas/Usek
- 6) Pencetakan Kartu Peserta Unas/Usek
- 7) Penyusunan Surat kreputusan Walikota
- 8) Pencairan dana
- 9) Monitoring pelaksanaan Unas/Usek
- 10)Evaluasi penyelenggaraan Unas/Usek
- 11)Bantuan ujian Kesetaraan Paket B dan C (untuk memberikan bantuan kepada peserta didik yang tidak lulus pada saat mengikuti Ujian Nasional dan Ujian Sekolah melalui jalur pendidikan formal).

**c. Fasilitasi Pemilihan Jenjang Pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan**

Sejalan dengan Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional, pada jenjang Pendidikan Menengah jalur formal, pendidikan diarahkan kepada penyiapan peserta didik untuk memasuki Dunia Usaha dan Dunia Industri. Untuk itu, secara bertahap rasio pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan adalah 40 : 60. Atas dasar pertimbangan tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta mengambil langkah-langkah strategis dengan membuka program-program keahlian baru yang memiliki daya serap output tinggi pada Dunia Usaha dan Dunia Industri. Langkah ini ditempuh mengingat Kota Yogyakarta berpeluang kecil untuk membuka SMK yang baru. Yang dapat dilakukan adalah mengembangkan SMK yang sudah ada dengan membuka program keahlian yang baru. Untuk itu, perlu adanya fasilitasi pemilhan jenjang pendidikanpada Sekolah Menengah Kejuruan agar calon peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang SMK tidak mengalami kesulitan. Kegiatannya adalah:

- 1) Memberikan kemudahan masuk ke SMK,
- 2) Memberikan modal usaha lulusan SMK,
- 3) Sosialisasi pendidikan SMK, serta

- 4) Bantuan biaya praktik kerja industri.

**d. Pengembangan pendidikan inklusi**

- 1) Sosialisasi satuan pendidikan penyelenggara inklusi
- 2) Penunjukan satuan pendidikan penyelenggara inklusi
- 3) Dukungan fasilitas
- 4) Monitoring
- 5) Evaluasi

**2. Pengembangan Kependidikan Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dari Aspek: Lulusan, Proses, Manajemen, Sarana Prasarana Dan Lingkungan Sekolah**

Untuk mengembangkan sistem pendidikan berkualitas dilakukan dengan penyiapan regulasi di bidang sistem penyelenggaraan pendidikan dan kebijakannya berupa: Peningkatan kualitas pendidikan dari aspek lulusan proses, manajemen, sarana prasarana dan lingkungan sekolah dengan berbagai implikasinya yang berupa Program sertifikasi dan peningkatan kualitas pendidik, tenaga kependidikan, akreditasi sekolah, standarisasi sarana prasarana. Sasarannya adalah : Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan ; Standarisasi sarana dan prasarana pendidikan; Peningkatan manajemen kelembagaan; Peningkatan kerja sama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri.

**a. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan**

Untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan. Salah satunya, sertifikasi pendidik. Program sertifikasi pendidik sejalan dengan program Pemerintah dalam rangka peningkatan kompetensi guru. Pada tahun 2006, pendataan calon peserta sertifikasi guru Tahap I sudah dilakukan tetapi pelaksanaannya dilakukan pada tahun 2007. Sertifikasi Tahap II dilakukan pada tahun 2007. Jumlah pendidik yang mengikuti sertifikasi guru ditentukan

berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Kuota untuk Kota Yogyakarta pada tahun 2006: 75 orang yang terdiri atas 59 guru SD dan 16 guru SMP, semuanya PNS. Kuota untuk Kota Yogyakarta tahun 2007 adalah 653 orang yang terdiri dari Guru TK (PNS 72, Non-PNS 18); Guru SD (PNS 122, Non-PNS 47); Guru SMP (PNS 110, Non-PNS 32); Guru SMA (PNS 110, Non-PNS 28); dan Guru SMK (PNS 91, Non-PNS 23). Bagi guru yang lolos dalam penjurian, dilakukan penilaian 'lapangan' oleh Pengawas Sekolah dengan menilai pembelajaran yang dilakukan Guru saat mengajar dan Guru-guru yang lolos dalam penjurian tersebut juga sudah mengumpulkan portofolio.

Sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Sertifikasi Guru Tahun 2007, persyaratannya adalah:

- 1) Sertifikasi berlaku untuk Guru PNS dan Guru Non-PNS;
- 2) Pendataan untuk sertifikasi bagi PNS ditentukan berdasarkan peringkat masa kerja Guru, usia, golongan, beban mengajar, tugas-tugas yang dipegang/jabatan di sekolah, prestasi yang dimiliki;
- 3) Pendataan untuk sertifikasi bagi Guru Non-PNS ditentukan berdasarkan peringkat masa kerja Guru, usia, beban mengajar, tugas-tugas yang dipegang/jabatan di sekolah, prestasi yang dimiliki;
- 4) Guru yang lolos pendataan mengumpulkan dokumen portofolio, termasuk hasil penilaian kompetensi mengajar oleh Pengawas Sekolah dan Dinas Pendidikan

Guru, yang sudah hampir pensiun dan mengikuti seleksi sertifikasi Guru, diikuti juga dalam sertifikasi Guru tersebut. Hal ini didasarkan atas persyaratan dan kriteria sebagaimana yang disampaikan di atas. Masa kerja adalah kriteria pertama dan usia adalah kriteria kedua, maka guru yang berusia lanjut tetap mendapatkan kesempatan awal.

- 1) Sejalan dengan sertifikasi guru, Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan perhatian terhadap Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang bekerja pada satuan-satuan pendidikan di Kota Yogyakarta, terutama pada satuan pendidikan negeri.

**b. Standarisasi sarana dan prasarana pendidikan**

Sehubungan kawasan Kota Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006 ada musibah gempa bumi yang mengakibatkan kerusakan fasilitas pendidikan, Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan skala prioritas pada penanganan pasca gempa. Penanganan tersebut khususnya meliputi sarana – prasarana sebagai berikut: Rehabilitasi gedung sekoah, baik yang didani oleh APBD Kota Yogyakarta, APBD Provinsi, APBN, dan bantuan berbagai donator swasta serta Pengadaan mebelair Ruang Kelas SD.

**c. Peningkatan manajemen kelembagaan**

Dalam rangka mengembangkan satuan pendidikan menuju ke aras global yang tetap mengedepankan nasionalisme dan muatan local, Pemerintah Daerah melakukan program Peningkatan Manajemen Kelembagaan. Program ini diarahkan kepada usaha peningkatan kualitas kelembagaan satuan-satuan pendidikan agar memiliki standar kelembagaan yang mampu bersaing pada aras global. Arah kegiatannya adalah menyiapkan satuan-satuan pendidikan yang memiliki standar layanan manajemen kelembagaan sesuai dengan ISO 9001-2000 serta menuju pada terwujudnya Sekolah-sekolah nasional Berstandar Internasional (SNBI/SBI). Program ini dimaksudkan untuk dapat mendongkrak terpuruknya peringkat pendidikan Indonesia dibandingkan dengan peringkat pendidikan Negara-negara lain.

Program lain yang dilakukan untuk dapat meningkatkan manajemen kelembagaan adalah pemberian perhatian dan bantuan

kepada satuan-satuan pendidikan dalam rangka mengikuti akreditasi sekolah. Melalui program ini, satuan-satuan pendidikan dapat dimotivasi untuk memberikan layanan bermutu terhadap masyarakat.

Untuk dapat berkembang sesuai dengan arah yang benar, satuan-satuan pendidikan perlu menyusun Rencana Pengembangan Sekolah (RPS). Untuk itu, perlu adanya motivasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Melalui kegiatan pendampingan penyusunan RPS, diharapkan satuan-satuan pendidikan dapat mengembangkan sekolahnya menuju sekolah potensial, sekolah standar nasional, sekolah kategori mandiri (SKM), serta sekolah berstandar internasional (SBI).

**d. Peningkatan kerja sama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri**

Untuk menyiapkan peserta didik agar dapat memasuki persaingan global, peran Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) sangat diperlukan. Untuk itu, perlu adanya kerjasama antara Pemerintah Daerah, satuan pendidikan dan (DUDI). Langkah yang dilakukan adalah pendataan DUDI baik yang ada di Kota Yogyakarta maupun daerah lainnya, penyiapan bentuk kerja samanya, serta pembuatan MoU-nya.

**3. Mengembangkan Sistem Pendidikan Berkualitas Yang Dapat Mewujudkan Keseimbangan Antara Kecerdasan Intelektual, Emosional, Dan Spiritual**

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, perlu diupayakan adanya peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta, baik pada jalur pendidikan formal maupun jalur non-formal. Untuk itu, fokus program kegiatannya berupa program peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan. Program tersebut meliputi kegiatan penyelenggaraan Ulangan Umum, baik Jenjang SD maupun SMP, khususnya pada semester 2; *Regrouping* SD yang dipertimbangkan akan lebih efektif dalam melayani masyarakat jika perlu *diregrouping*;

Pembinaan prestasi siswa; Pendidikan dan pelatihan penulisan Soal bagi Guru SD, SMP, SMA, maupun SMK; Peningkatan Kompetensi Pendidikan Kejuruan; Penerimaan Siswa Baru On-Line; Pengembangan Wawasan Keilmuan Pendidikan Menengah; Usaha Kesehatan Sekolah; Sosialisasi dan Penguatan Kurikulum Pendidikan Menengah; Pemberdayaan Tenaga Fungsional Pendidikan Menengah; Seleksi dan Pelatihan Paskribaka; Pekan Olahraga Pelajar; Pertukaran pelajar; Ujian Kesetaraan Paket A, B, C; Pengembangan Minat, Bakat, Seni; Pembinaan dan Pengembangan Program Pendidikan Nonformal; Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan; Pelatihan/Orientasi Pengelolaan Perpustakaan Masyarakat; Pengelolaan dan Pemberian Bantuan PAUD; Pemberian Biaya Operasional Sekolah Negeri; Penyusunan Buku Profil Pendidikan; Pembinaan Karir Pegawai; Bimbingan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Guru TK, SD, SMP, SMA, SMK; *Workshop* Implementasi Pendidikan Agama dan Bahasa Inggris; Inovasi dan Strategi Media Pembelajaran; Pemberian Bantuan Peningkatan Mutu Pendidikan; serta Pengembangan Pemahaman dan Kesadaran tentang Kesetaraan Gender.

Berbagai rincian kegiatan dalam rangka mengembangkan system pendidikan berkualitas yang dapat mewujudkan keseimbangan antara kecerdasan intelegensia, emosional, dan spiritual tersebut, dituangkan dalam rincian sebagai berikut.

- 1) Penyelenggaraan Ulangan Umum SD, SMP, Semester 2
  - a) Pendataan calon peserta
  - b) Penyusunan naskah soal
  - c) Prelaksanaan
  - d) Pengolahan nilai
  - e) Evaluasi
- 2) Regrouping Sekolah Dasar
  - a) Sosialisasi
  - b) Inventarisasi dan identifikasi
  - c) Verifikasi

- d) Penetapan
- e) Evaluasi dan monitoring
- 3) Pembinaan Prestasi Siswa
  - a) Sosialisasi
  - b) Pelaksanaan lomba
  - c) Penetapan kejuaraan
  - d) Pembinaan
- 4) Diklat Penulisan Soal bagi Guru SD, SMP, SMA, SMK
  - a) Sosialisasi dan koordinasi
  - b) Penjaringan peserta
  - c) Pelaksanaan
  - d) Evaluasi
- 5) Peningkatan Kompetensi Pendidikan Kejuruan
- 6) Penerimaan Siswa Baru On-Line
- 7) Pengembangan wawasan Keilmuan Pendidikan Menengah
- 8) Usaha Kesehatan Sekolah
- 9) Sosialisasi dan Penguatan Kurikulum Pendidikan Menengah
- 10) Pemberdayaan Tenaga Fungsional Pendidikan Menengah
- 11) Seleksi dan Pelatihan Paskribaka
- 12) POR Pelajar
- 13) Pertukaran Pelajar
  - a) Sosialisasi
  - b) Seleksi calon peserta
  - c) Pembekalan
  - d) Pelaksanaan/pengiriman pelajar
  - e) Evaluasi
- 14) Ujian Kesetaraan Paket A, B, C
  - a) Inventarisasi calon peserta
  - b) Sosialisasi
  - c) Pelaksanaan pembelajaran
  - d) Evaluasi
- 15) Penyelenggaraan Paket A, B, C

- a) Pendataan peserta Paket
  - b) Sosialisasi tempat penyelenggaraan
  - c) Pelaksanaan pembelajaran Paket
  - d) Evaluasi/Ujian
  - e) Pemberian ijazah bagi yang berhasil
- 16)Penguatan penyelenggaraan lembaga kursus
- a) Sosialisasi pedoman penyelenggaraan kursus
  - b) Pembinaan
  - c) Pemberian dukungan penghargaan dan perlindungan
  - d) Monitoring
  - e) Evaluasi
- 17)Pengembangan Minat, Bakat, Seni
- a) Penyusunan pedoman
  - b) Sosialisasi
  - c) Seleksi
  - d) Gebyar Seni
  - e) Evaluasi
- 18)Pembinaan dan Pengembangan Program Pendidikan Non-formal
- Peran masyarakat dalam pendidikan non-formal:
- a) Masyarakat sebagai pengelola/penyelenggara lembaga kursus;
  - b) Sebagai penyelenggara/pengelola bersama dalam Ujian Nasional/Ujian lokal
  - c) Bergabung dalam wadah organisasi, forum, himpunan, bekerja sama dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan pendidikan pendidikan non-formal

Permasalahan yang muncul dalam pendidikan non-formal adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti program pendidikan non-formal. Untuk itu, perlu adanya motivasi kepada masyarakat tentang perlunya pendidikan nonformal bagi peserta didik yang putus sekolah

- a. Keaksaraan fungsional



- 1) Pendataan calon peserta KF
  - 2) Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan
  - 3) Pelaksanaan
    - Pemberantasan
    - Pembinaan
    - Pelestarian
    - Evaluasi
- b. Pendidikan melalui Kursus
- 1) Inventarisasi kelembagaan
  - 2) Sosialisasi dan koordinasi
  - 3) Pelaksanaan ujian nasional
  - 4) Sertifikasi kelembagaan
1. Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan
    - a. Sosialisasi dan koordinasi
    - b. Pendataan/inventarisasi
    - c. Monitoring dan pendampingan
    - d. Workshop pengelolaan perpustakaan
    - e. Penyajian bantuan
    - f. Evaluasi dan pelaporan
  2. Pelatihan/Orientasi pengelolaan Perpustakaan Masyarakat
    - a. Sosialisasi dan koordinasi
    - b. Pendataan/inventarisasi
    - c. Monitoring dan pendampingan
    - d. Workshop pengelolaan perpustakaan
    - e. Evaluasi dan pelaporan
  3. Pengelolaan dan Pemberian Bantuan PAUD
    - a. Ketersediaan fasilitas dan Kurikulum bagi Anak Usia Dini  
 Kurikulum untuk PAUD tidak/belum ada. Yang ada adalah menu generic yang disiapkan oleh Direktorat PAUD. PKK Kota Yogyakarta bersama forum PAUD telah menyusun Buku Acuan Panduan Pembelajaran untuk Anak Usia Dini.

- b. Keberadaan sekolah alam bagi anak usia dini: ada, yakni Sanggar Alam, terletak di Bugisan (dekat SMSR).

Di samping itu, di Kota Yogyakarta Pendidikan Anak Usia Dini dilaksanakan melalui TK, Tempat Penitipan ANak TPA), SPS (Serikat PAUD Sejenis). Secara formal belum ada sekolah alam bagi anak usia dini, meski poses pembelajaran pada PAUD di Kota Yogyakarta dikembangkan dengan memperhatikan konsep pendidikan alamiah bagi Anak Usia Dini.

Lembaga yang menangani PAUD di Kota Yogyakarta adalah Forum PAUD, HIMPAUDI, HIPKI, HISPPI, Forum PKBM, Forum TBM

- a. Pendataan kelembagaan dan peserta didik
  - b. Monitoring pelaksanaan PAUD
  - c. Evaluasi pelaksanaan PAUD
  - d. Sertifikasi PAUD formal
4. Pemberian Biaya Operasional Sekolah negeri
    - a. Sosialisasi dan koordinasi
    - b. Pencermatan proposal
    - c. Penetapan alokasi
    - d. Penyaluran dana
    - e. Monitoring dan evaluasi
5. Penyusunan Buku Profil Pendidikan
    - a. Sosialisasi
    - b. Distribusi
    - c. Pengolahan data Primer
    - d. Validasi
    - e. Penyusunan Buku Profil

6. Pembinaan Karier Pegawai
  - a. Sosialisasi dan koordinasi
  - b. Inventarisasi
  - c. Pengolahan Data
  - d. Penetapan/Penyaluran
  
7. Bimbingan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Guru TK, SD, SMP, SMA, SMK
  - a. Sosialisasi
  - b. Penjaringan Peserta
  - c. Workshop Penulisan Karya Ilmiah
  - d. Penulisan dan Pembimbingan
  - e. Seminar
  - f. Penyaluran Banuan
  - g. Evaluasi
  
8. Workshop Implementasi Pendidikan Agama dan Bahasa Inggris
  - a. Sosialisasi dan koordinasi
  - b. Penjaringan Peserta
  - c. Pelaksanaan
  - d. Implementasi pengembangan pembelajaran hasil workshop
  - e. Monitoring dan evaluasi
  
9. Inovasi Strategi dan Media Pembelajaran
  - a. Sosialisasi
  - b. Penjaringan peserta
  - c. Workshop
  - d. Penulisan/Pembuatan Inovasi Pemelajaran
  - e. Seleksi
  - f. Penetapan Hasil Lomba
  - g. Pemberian Dana

10. Media Komunikasi SD dan SMP

- a. Penjaringan Naskah
- b. Penyuntingan Naskah
- c. Penyaluran Naskah
- d. Safari Junalistik
- e. Evaluasi

11. Pemberian Bantuan Peningkatan Mutu Pendidikan

- a. Penyusunan Kriteria Kegiatan
- b. Sosialisasi
- c. Penetapan
- d. Penyaluran Bantuan
- e. Evaluasi

12. Pembelajaran Berbasis Internet – e Learning untuk peningkatan pemerataan mutu Pendidikan di SMA

- a. Penyusunan Konsep
- b. Sosialisasi
- c. Ujicoba SMA terdekat
- d. Evaluasi
- e. Pengembangan

13. Pengembangan Pemahaman dan Kesadaran tentang Kesetaraan Gender

Sosialisasi dan Pelatihan bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan

**4. Memperluas Jangkauan dan Jenis Sistem Pembelajaran untuk Masyarakat**

Upaya memperluas jangkauan dan jenis sistem pembelajaran untuk masyarakat dicapai melalui program Pengkajian dan

Pengembangan Mutu Pendidikan. Dalam program ini terdapat 4 (empat) kegiatan yaitu:

- a. Penyelenggaraan Penelitian Pendidikan
- b. Perencanaan dan Pengkajian Pendidikan
- c. Pengembangan Pembeajaran Team Teaching
- d. Pengembangan Pembelajaran berbasis e Learning

Prioritas Kebijakan sebagaimana disampaikan pada sub bab tersebut diatas kemudian dilaksanakan melalui program dengan sasaran sampai dengan tahun 2011 sebagai berikut :

1. Wajib belajar 12 tahun

Sasaran program:

Meningkatnya angka partisipasi sekolah menjadi 100% untuk seluruh anak usia sekolah dari TK sampai dengan SMA/SMK dan pemberian beasiswa 100% untuk warga Kota Yogyakarta yang tidak mampu serta menurunnya angka buta aksara.

2. Sertifikasi dan peningkatan kualitas pendidik, tenaga kependidikan, akreditasi sekolah, standarisasi sarana prasarana .

Sasaran program:

Meningkatnya jumlah tenaga pendidikan yang bersertifikat sebesar 90%, kualitas pendidikan yang merata pada setiap jenjang pendidikan meningkat 30 %, jumlah sekolah yang terakreditasi meningkat sebesar 30% dan sarana prasarana yang memenuhi standar meningkat sebesar 30%.

3. Peningkatan pemerataan kualitas pendidikan formal dan nonformal.

Sasaran program:

Meningkatnya kualitas pendidikan yang merata pada setiap jenjang pendidikan baik formal dan nonformal sebesar 15%.

4. Pengkajian dan pengembangan mutu pendidikan.

Sasaran program:

Diperolehnya baku mutu di atas rata-rata sebesar 10%

5. Program peningkatan sarana prasarana pemerintahan  
Sasaran program:  
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan menjadi 95 %
6. Program peningkatan kualitas SDM  
Sasaran program:  
Meningkatkan kesesuaian dengan kebutuhan menjadi sebesar 90 %.
7. Program pengembangan wawasan kebangsaan  
Sasaran program :  
Berkurangnya konflik di masyarakat mendekati 0 %
8. Program pembinaan dan pengembangan generasi muda  
Sasaran program:  
Meningkatnya aktifitas dan partisipasi pemuda dalam membangun sebesar 20 %
9. Program fasilitasi olah raga  
Sasaran program:  
Meningkatnya budaya olah raga masyarakat dan prestasi olah raga tingkat nasional naik sebesar 20 %.
  
10. Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja  
Sasaran program:  
Meningkatnya jumlah pencari kerja terlatih sebesar 7,49 %
11. Program penelitian dan pengembangan  
Sasaran program:  
Meningkatnya cakupan/keterkaitan hasil penelitian dan pengembangan dalam kegiatan pembangunan sebesar 10 %.
12. Program upaya pelayanan kesehatan  
Sasaran program:  
Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau sebesar 10 %.
13. Program pengembangan pariwisata

Sasaran program:

Meningkatnya kunjungan dari 715.210 menjadi 2.500.000 dan lama tinggal dari 2.3 hari menjadi 2.5 hari

#### 14. Program Peningkatan ketentraman dan ketertiban

Sasaran program:

Meningkatnya penanganan pelanggaran perda yang diselesaikan secara pro yustisi indikasi pelanggaran masyarakat terhadap perda sebesar 5 %

Adapun rincian program, kegiatan, dan pembiayaan selama tahun 2007 – 2011 Rencana Aksi Daerah Mewujudkan Pendidikan Berkualitas adalah sebagai berikut :

**MATRIK RENCANA AKSI DAERAH MEWUJUDKAN PENDIDIKAN BERKUALITAS  
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007-2011**

NO	KEBIJAKAN PROGRAM	PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	SKPD	PAGU INDIKATIF (jutaan rupiah)					JUMLAH
					2007	2008	2009	2010	2011	
1	Meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau	Program wajib belajar 12 tahun	Angka Partisipasi Sekolah dari 90 % menjadi 100 %		9.346	9.814	12.365	12.365	12.565	56.455
			Beasiswa dari 80 % menjadi 100 %							
		1 Pengeloaan Pemberian Beasiswa, Retrieval, Bantuan Pendidikan	Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V		
		2 Pemberian Bantuan UAN/UAS	Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V		
		3 Pemberantasan Buta Aksara BKM, SMA, SMK	Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V		
		4 Fasilitasi Pemilihan Jenjang SMK	Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V		
		5 Pengembangan Pendidikan Inklusi	Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V		



NO	KEBIJAKAN PROGRAM	PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	SKPD	PAGU INDIKATIF (jutaan rupiah)					JUMLAH	
					2007	2008	2009	2010	2011		
2	Meningkatkan kualitas pendidikan dari aspek lulusan proses, manajemen, sarana prasarana dan lingkungan sekolah	Program sertifikasi dan peningkatan kualifikasi pendidik, tenaga kependidikan, akreditasi sekolah, standarisasi sarana prasarana	Meningkatnya jumlah tenaga pendidikan yang bersertifikat dari 0 % menjadi 90 %		15.180	15.021	16.540	19.000	20.978	86.719	
			Meningkatnya kualitas pendidikan yang merata pada setiap jenjang pendidikan dari 70 % menjadi 100 %								
			Meningkatnya jumlah sekolah yang terakreditasi dari 70 % menjadi 100 %								
			Meningkatnya standarisasi sarana dan prasarana dari 50 % menjadi 80 %								
		1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan		Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V		
		2 Akreditasi Sekolah Swasta		Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V		
		3 Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V		
		4 SSN SD		Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V		

NO	KEBIJAKAN PROGRAM	PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	SKPD	PAGU INDIKATIF (jutaan rupiah)					JUMLAH
					2007	2008	2009	2010	2011	
		5 SSN SMP		Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V	
		6 School Grand SD		Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V	
		7 School Grand SMP		Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V	
		8 PKH SMP		Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V	
		9 Peningkatan Manajemen Kelembagaan		Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V	
		10 Peningkatan Kerja Sama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri		Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V	
3	Mengembangkan system pendidikan berkualitas yang dapat mewujudkan keseimbangan antara kecerdasan intelegensia, emosional, dan spiritual	Program peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan formal dan non formal	Meningkatnya kualitas pendidikan dari 85 % menjadi 100 %		17.165	16.961	17.340	17.540	69.006	138.012
		1 Pemberian Bantuan Siswa dan Guru Berprestasi		Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V	
		2 Penyelenggaraan Paket A, B, C		Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V	
		3 Pengelolaan dan Pemberian Bantuan PAUD		Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V	

NO	KEBIJAKAN PROGRAM	PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	SKPD	PAGU INDIKATIF (jutaan rupiah)					JUMLAH
					2007	2008	2009	2010	2011	
		4 Peningkatan Kompetensi Pendidikan Kejuruan		Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V	
		5 Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Agama dan Bahasa Indonesia		Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V	
		6 Penerimaan Siswa Baru Online		Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V	
		7 Inovasi Media dan Strategi Pembelajaran		Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V	
		8 Pameran Pendidikan		Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V	
		9 Ujian Paket A, B,C		Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V	
		10 Penyelenggaraan Tes Kendali Mutu SMA		Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V	
		11 Pengembangan Minat Baca dan Seni Siswa		Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V	
		12 Pembinaan dan Pengembangan Program Pendidikan Non Formal		Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V	
		13 Pemberdayaan Tenaga Fungsional Pendidikan Menengah		Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V	
		14 Peningkatan Kompetensi Pendidikan Kejuruan		Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V	

NO	KEBIJAKAN PROGRAM	PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	SKPD	PAGU INDIKATIF (jutaan rupiah)					JUMLAH
					2007	2008	2009	2010	2011	
		15 Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan		Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V	
		16 Pemberian Biaya Operasional Sekolah Negeri		Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V	
		17 Pertukaran Pelajar		Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V	
		18 Pembinaan Karier Pegawai		Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V	
		19 Pembinaan Media Komunikasi		Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V	
		20 POR Pelajar		Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V	
		21 Bimbingan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Untuk Guru, TK, SD, SMP, SMA, SMK		Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V	
		22 Usaha Kesehatan Sekolah		Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V	
		23 Regrouping Sekolah SD		Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V	
		24 Diklat Penulisan Soal bagi Guru SD, SMP, SMA, SMK		Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V	
		25 Pembinaan Prestasi Siswa dan Gugus Sekolah		Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V	

NO	KEBIJAKAN PROGRAM	PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	SKPD	PAGU INDIKATIF (jutaan rupiah)					JUMLAH
					2007	2008	2009	2010	2011	
		26 Pengelolaan Data Pendidikan		Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V	
		27 Sosialisasi dan Penguatan Kurikulum Pendidikan Menengah		Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V	
		28 Penyelenggaraan Ulangan Umum Semester 2		Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V	
		29 Pengembangan Wawasan Keilmuan Pendidikan Menengah		Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V	
		30 Seleksi dan Pelatihan Paskibraka Kota Yogyakarta		Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V	
		31 Pengembangan Perpustakaan Komunitas		Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V	
		32 Retrieval SMP		Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V	
		33 Bakat Prestasi		Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V	
		34 Live Skill		Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V	
		35 Penyelenggaraan Ulangan		Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V	
		36 Usaha Kesehatan Sekolah		Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V	

NO	KEBIJAKAN PROGRAM	PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	SKPD	PAGU INDIKATIF (jutaan rupiah)					JUMLAH
					2007	2008	2009	2010	2011	
		37 Pemberdayaan Tenaga		Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V	
		38 Penguatan Penyelenggaraan Lembaga Kursus		Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V	
		39 Pemberian Biaya Operasional Sekolah Negeri		Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V	
		40 Penyusunan Buku Profil Pendidikan		Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V	
		41 Pemberian Bantuan Peningkatan Mutu Pendidikan		Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V	
		42 Pengembangan Pemahaman dan Kesadaran		Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V	
4	Memperluas jangkauan dan jenis sistem pembelajaran	<b>Pengkajian dan pengembangan mutu pendidikan</b>	<b>Diperolehnya baku mutu diatas rata-rata naik 10 %</b>		<b>1.000</b>	<b>1.050</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>5.350</b>
		1 Penyelenggaraan Penelitian Pendidikan			V	V	V	V	V	
		2 Perencanaan dan Pengkajian Pendidikan				V	V	V	V	
		3 Pengembangan Pembelajaran Team Teacing								

NO	KEBIJAKAN PROGRAM	PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	SKPD	PAGU INDIKATIF (jutaan rupiah)					JUMLAH
					2007	2008	2009	2010	2011	
		4 Pengembangan Pembelajaran berbasis e learning						V	V	
5	Memanfaatkan Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia dan Organisasi yang meliputi Struktur, Sistem dan Prosedur, serta Kepastian Pelayanan	Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 80 % menjadi 95 %							
		1 Rehab Bangunan Pemerintah Fasilitas Pendidikan		BPBD	V	V	V	V	V	
		2 Pembangunan UPT Dinas Pendidikan Wilayah Selatan dan Timur		BPBD	V	V	V	V	V	
		3 Pembangunan Taman Pintar		BPBD	V	V	V	V	V	
		4 Rehab Gedung Sekolah		BPBD	V	V	V	V	V	
		5 Pengadaan Armada Keliling Perpustakaan Komunitas			BPBD	V	V	V	V	V
		6 Hot Spot/WAIS Perpustakaan Daerah untuk pengembangan minat baca dan peningkatan mutu pendidikan		Dinas Pendidikan				V	V	

NO	KEBIJAKAN PROGRAM	PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	SKPD	PAGU INDIKATIF (jutaan rupiah)					JUMLAH
					2007	2008	2009	2010	2011	
		Program Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dari 70 % menjadi 90 %		3.963	6.137	6.347	5.868	6.162	28.477
		1 Penyelenggaraan Diklat		B K D	V	V	V	V	V	
6	Meningkatkan Wawasan Kebangsaan, Keamanan, Ketertiban dan Paran Media Komunikasi Dengan Prinsip Demokrasi Yang Dijiwai Oleh Semangat Persatuan, Kerukunan, Kedamaian, Kesejahteraan, Keadilan dan Kemakmuran	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Berkurangnya konflik di masyarakat mendekati 0 %							
		1 Menyelenggarakan Peningkatan Pemahaman Wasbang		Kantor Kesbangpor	V	V	V	V	V	
7	Meningkatkan Peran Generasi Muda Dalam Mendukung Mewujudkan Keamanan, Ketertiban dan Persatuan	Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda	Meningkatnya aktifitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan naik 20 %							
		1 Peningkatan Perenserta dan Pemberdayaan Pemuda		Kantor Kesbangpor	V	V	V	V	V	



NO	KEBIJAKAN PROGRAM	PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	SKPD	PAGU INDIKATIF (jutaan rupiah)					JUMLAH
					2007	2008	2009	2010	2011	
		Program Fasilitasi Olah Raga	Meningkatnya budaya olah raga masyarakat dan preasetasi olah raga tingkat nasional naik 20 %							
		1 Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga		Kantor Kesbangpor	V	V	V	V	V	
8	Mengembangkan Lingkungan Usaha dan Iklim Investasi	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Jumlah Pencari Kerja Terlatih dari 3,43 % menjadi 10,92 %		1.080	1.140	1.200	1.260	1.320	6.000
		1 Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja		Disnakertrans	V	V	V	V	V	
		2 Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja		Disnakertrans	V	V	V	V	V	
9	Meningkatkan Manajemen Pembangunan	Program Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan cakupan/ keterkaitan hasil penelitian dan pengembangan dalam kegiatan pembangunan dari 80 % menjadi 90 %		400	350	350	350	350	1.800
		1 Penelitian dan Pengembangan		Bappeda	V	V	V	V	V	

NO	KEBIJAKAN PROGRAM	PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	SKPD	PAGU INDIKATIF (jutaan rupiah)					JUMLAH
					2007	2008	2009	2010	2011	
10	Memasyarakatkan Budaya Perilaku Hidup Sehat (Pola Hidup dan Lingkungan) dan Surveillance serta Monitoring Kesehatan	Program Upaya Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau dari 70 % menjadi 80 %		2.280	2.406	2.533	2.786	2.659	12.664
		1 Penyelenggaraan Perbaikan Gizi Masyarakat dan PMTAS		Dinas Kesehatan	V	V	V	V	V	
		2 Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Reproduksi remaja		Dinas Kesehatan	V	V	V	V	V	
		3 Pelatihan SDIDTK Anak		Dinas Kesehatan	V	V	V	V	V	
		4 Sosialisasi SDITK Anak bagi Guru TK di Kota Yogyakarta		Dinas Kesehatan	V	V	V	V	V	
		5 Pelayanan Kesehatan Anak SD		Dinas Kesehatan	V	V	V	V	V	
		7 Pelayanan Kesehatan Anak SMP		Dinas Kesehatan	V	V	V	V	V	
		8 Pelayanan Kesehatan Anak SMA		Dinas Kesehatan	V	V	V	V	V	
		9 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi UKS di Kota Yk		Dinas Kesehatan	V	V	V	V	V	
		10 Lomba Sekolah Sehat di Kota Yogyakarta		Dinas Kesehatan	V	V	V	V	V	

NO	KEBIJAKAN PROGRAM	PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	SKPD	PAGU INDIKATIF (jutaan rupiah)					JUMLAH
					2007	2008	2009	2010	2011	
11	Melakukan Inovasi dan Pengembangan Seluruh Aspek Kepariwisata yang Tetap Berlandaskan kepada Wisata Budaya, Wisata Bangunan Bersejarah, Wisata Pendidikan, Wisata Konvesi dan Belanja	Program Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan Kunjungan dari 715.210 menjadi 2.500.000 dan lama tinggal dari 2,3 hari menjadi 2,5 hari		2.048	2.276	2.540	3.000	3.160	13.024
		1 Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata		Dinas Pariwisata	V	V	V	V	V	
		2 Pengembangan Kerjasama dan Promosi Kepariwisata		Dinas Pariwisata	V	V	V	V	V	
		3 Pembinaan Industri Kepariwisata		Dinas Pariwisata	V	V	V	V	V	
		4 Pengembangan dan Pengelolaan Potensi Kepariwisata		Dinas Pariwisata	V	V	V	V	V	
12	Meningkatkan kesadaran, kedisiplinan dan peran serta masyarakat dalam menjaga dan menciptakan suasana Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban	Meningkatkan penanganan pelanggaran perda yang diselesaikan secara pro yustisi indikasi pelanggaran terhadap perda dari 85% menjadi 90 %		3.500	3.675	3.858	4.052	4.147	19.232
		1 Pembinaan ketentraman dan ketertiban		Dinas Ketertiban	V	V	V	V	V	

## **BAB V PELAKSANAAN**

### **A. Mekanisme**

Pendidikan merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, maka wewenang pendidikan berada di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Rencana Aksi Daerah Mewujudkan Pendidikan Berkualitas sebagai penjabaran lebih lanjut pelaksanaan program yang terdapat dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dengan dukungan program dan kegiatan dari SKPD terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta serta unsur swasta, masyarakat, dunia usaha dunia pendidikan dan *stakeholder* lainnya. Sebagai amanat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2011, maka dalam pelaksanaannya dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program/kegiatan yang sudah berjalan.

#### **1. Perencanaan dan Penganggaran**

Rencana Aksi Daerah Mewujudkan Pendidikan Berkualitas dalam perencanaannya mengacu mekanisme perencanaan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006.

Program dan kegiatan oleh SKPD/Unit Kerja dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD untuk setiap tahunnya sebagai masukan pelaksanaan Musrenbang, penyusunan RKPD, KUA, PPAS dan RKA-

DPA SKPD. Program dan Kegiatan tersebut disertai indikator yang jelas, baik pada tingkatan keluaran maupun hasil, serta keterkaitan dengan indikator pada tujuan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah untuk mengetahui ketercapaian tujuan.

Penganggaran untuk setiap program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan pelaksanaan lainnya di tingkat daerah. Anggaran yang disusun merupakan anggaran berbasis kinerja, sehingga setiap anggaran kegiatan mencerminkan keluaran dan hasil secara kualitatif dan kuantitatif.

## 2. Pelaksanaan dan Pengendalian

Pelaksanaan rencana aksi dilakukan oleh setiap SKPD/Unit kerja yang bersangkutan baik sendiri-sendiri maupun melalui koordinasi. Koordinasi sangat diperlukan untuk melaksanakan rencana aksi yang keberhasilannya didukung oleh kegiatan di beberapa SKPD/Unit Kerja. Dalam pelaksanaan kegiatan setiap SKPD berpedoman pada pedoman lebih lanjut tentang pelaksanaan APBD.

Untuk menjamin pencapaian program/kegiatan selama tahun 2007-2011, maka pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Mewujudkan Pendidikan Berkualitas ini koordinasikan oleh Asisten Pembangunan Kota Yogyakarta dengan dibantu oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

## 3. Evaluasi dan Pelaporan

Tujuan Rencana Aksi Daerah Mewujudkan Pendidikan berkualitas tentu tidak mudah untuk dicapai, hambatan dan tantangan akan selalu ada. Untuk ini, secara periodik perlu dilakukan evaluasi baik lewat mekanisme yang sudah ada oleh SKPD yang mempunyai TUPOKSI evaluasi maupun oleh Tim yang diberi tugas untuk mengawal

pelaksanaan rencana aksi ini. Selain itu, laporan secara periodik menyangkut pelaksanaan dan hasil yang dicapai oleh masing-masing SKPD dan unit kerja diperlukan sebagai alat untuk mengukur ketercapaian program/kegiatan yang sudah dilakukan.

## **B. Kelembagaan**

Dalam rangka melaksanakan berbagai program/kegiatan untuk Mewujudkan Pendidikan Berkualitas perlu kerjasama antara tiga stakeholders yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Rencana Aksi Daerah ini dilaksanakan dengan memfungsikan SKPD dan lembaga yang sudah ada di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan, pencapaian tujuan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dikordinasikan oleh Asisten Pembangunan Kota Yogyakarta. Adapun SKPD/Unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

Beberapa lembaga atau asosiasi bersinergi dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Mewujudkan Pendidikan Berkualitas, seperti:

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Keamanan dan Ketertiban
3. Badan Pengelolaan Barang Daerah
4. Kantor Kesatuan Bangsa, Pemuda dan Olah Raga
5. UPT Taman Pintar
6. UPT Perpustakaan
7. UPT Cabang Dinas Wilayah Utara, Selatan, Barat dan Timur
8. Dewan Pendidikan
9. Komite Sekolah
10. PGRI, dan Stakeholders lainnya.

## **C. Pendanaan**

Pendanaan untuk rencana aksi daerah ini terutama berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Keterbatasan kemampuan APBD Kota Yogyakarta diharapkan tidak merupakan kendala dalam pelaksanaan RAD ini, sehingga

perlu dibuat skala prioritas. Skala prioritas ini dipilih untuk program/kegiatan yang mempunyai kontribusi besar dalam rangka mencapai tujuan rencana aksi yang telah ditetapkan.

Namun demikian untuk lebih mensukseskan pelaksanaan dan pencapaian tujuan perlu diusahakan anggaran baik dari Pemerintah pusat maupun pemerintah Propinsi DIY. Anggaran yang berasal dari APBN maupun APBD Propinsi DIY dapat dilakukan dengan mengusulkan anggaran baik lewat mekanisme yang ada yaitu Musrenbang Tingkat Pusat dan Musrenbang Tingkat Propinsi DIY, maupun usulan langsung kepada departemen terkait/pemerintah propinsi melalui program-program yang ada pusat maupun propinsi.

Upaya Mewujudkan Pendidikan Berkualitas memerlukan dukungan penganggaran yang tidak hanya berasal dari anggaran daerah, propinsi, dan pusat, akan tetapi juga diusahakan melalui kerjasama dengan berbagai pihak termasuk dengan lembaga-lembaga donor, swasta dan masyarakat.

#### **D. Indikator**

Indikator keberhasilan pelaksanaan diukur dengan beberapa tingkatan indikator yaitu indikator kinerja utama pada rencana aksi pokok dan pada setiap jenjang program dan kegiatan setiap rencana aksi.

Indikator kinerja utama keberhasilan Mewujudkan Pendidikan Berkualitas adalah :

1. Meningkatnya Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau, dicapai melalui program wajib belajar 12 tahun yang diukur dengan indikator angka partisipasi sekolah dari 90% menjadi 100% dan beasiswa dari 80% menjadi 100%.
2. Meningkatkan kualitas Pendidikan dari aspek lulusan, proses, manajemen, sarana prasarana dan lingkungan sekolah, dicapai melalui program sertifikasi dan peningkatan kualifikasi pendidik, tenaga kependidikan, akreditasi sekolah, standarisasi sarana prasarana yang diukur dengan indikator:

- a. meningkatnya jumlah tenaga Pendidikan yang bersertifikat dari 0% menjadi 90%.
  - b. Meningkatnya kualitas Pendidikan yang merata pada setiap jenjang Pendidikan dari 70% menjadi 100%
  - c. Meningkatnya jumlah sekolah yang terakreditasi dari 70% menjadi 100%
  - d. Meningkatnya standarisasi sarana dan prasarana dari 50% menjadi 80%
3. Mengembangkan sistem Pendidikan berkualitas yang dapat mewujudkan keseimbangan antara kecerdasan intelegensia, emosional, dan spiritual melalui program peningkatan dan pemerataan kualitas Pendidikan formal dan non formal dengan indikator:
- Meningkatnya kualitas Pendidikan dari 85% menjadi 100%
4. Memperluas jangkauan dan jenis sistem pembelajaran melalui program Pengkajian dan Pengembangan Mutu Pendidikan dengan indikator:
- Diperolehnya baku mutu diatas rata-rata naik 10%



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Rencana Aksi Daerah Mewujudkan Pendidikan Berkualitas Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 merupakan upaya Pemerintah Kota Yogyakarta untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan. Partisipasi masyarakat, swasta dan *stakeholders* terkait sangat diharapkan demi keberhasilan pencapaian Rencana Aksi Daerah ini. Komitmen dan keterlibatan *stakeholders* tersebut sejak dari perencanaan sampai pada pelaksanaan dan evaluasi menjadi penting artinya bagi Pemerintah Kota Yogyakarta.

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

**ttd**

**H. HERRY ZUDIANTO**